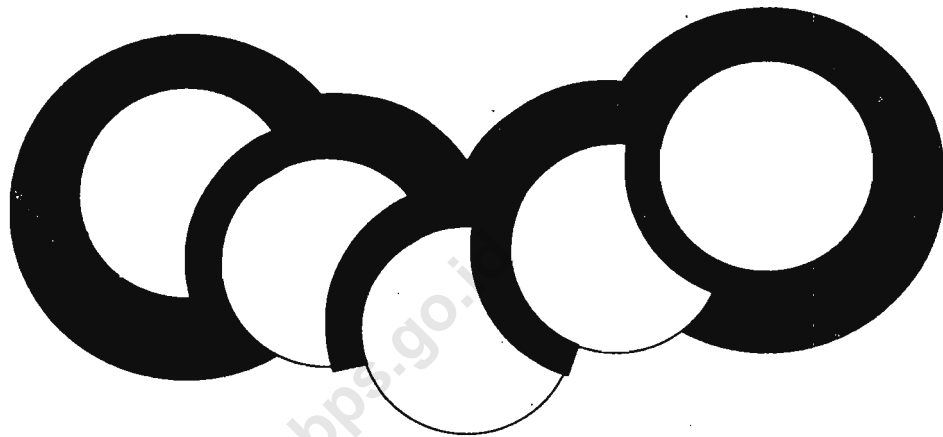




Nomor: 31560.9605
ISBN : 979.474.277.5

INDIKATOR EKONOMI DKI JAKARTA 1995/1996



KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA

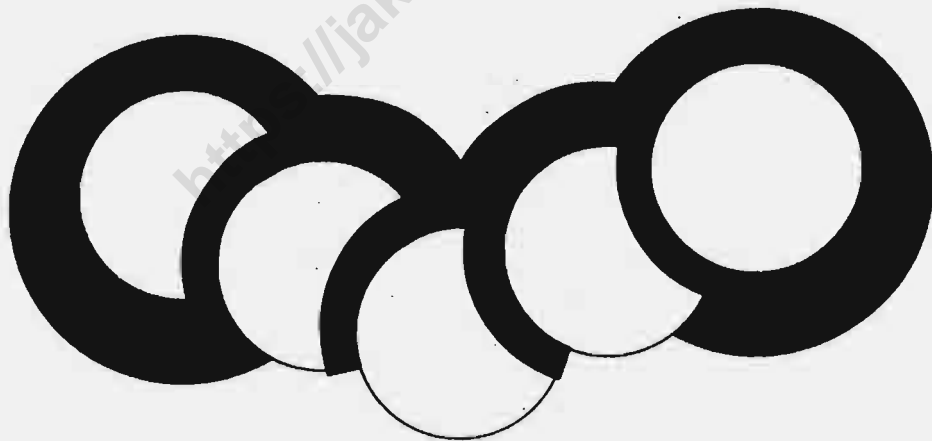
<https://jakarta.bps.go.id>



Nomor: 31560.9605
ISBN : 979.474.277.5

NO. PUSTAKA
M F N
MILIK BPS PROVINSI

INDIKATOR EKONOMI DKI JAKARTA 1995/1996



WILDA:

A R S I P

KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA

INDIKATOR EKONOMI DKI JAKARTA 1995/1996

ISBN : 979.474.277.5
NO. PUBLIKASI : 31560.9605

NASKAH:

BIDANG NERACA WILAYAH DAN ANALISIS

GAMBAR KULIT

BIDANG NERACA WILAYAH DAN ANALISIS

DITERBITKAN OLEH:

KANTOR STATISTIK PROPINSI
DKI JAKARTA

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Ekonomi DKI Jakarta 1995/1996 ini merupakan salah satu kegiatan penyajian data yang dilakukan dan diterbitkan secara berkala oleh Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.

Berbeda dengan publikasi sebelumnya, pada publikasi Indikator Ekonomi kali ini tidak hanya disajikan data hasil pengumpulan data sekunder dari berbagai instansi dan dinas terkait, tetapi juga disajikan analisis ringkas, dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai berbagai indikator ekonomi DKI Jakarta.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terwujudnya publikasi ini.

Jakarta, Maret 1996

KANTOR STATISTIK PROPINSI
DKI JAKARTA
Kepala,



ABDUL KADIR HASIBUAN, MSc

NIP 340000764

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN EKONOMI	8
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.2 Inflasi	10
2.3 Ekspor dan Impor	15
2.4 Neraca Perdagangan Luar Negeri	17
2.5 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	18
2.6 Produksi Beras	21
2.7 Pemerataan Pembangunan	24
III. PENDAPATAN REGIONAL DKI JAKARTA	28
3.1 Gambaran Umum	28
3.2 Perkembangan Ekonomi Sektoral dan Peranannya	29
3.3 Perkembangan Komponen-Komponen Penggunaan PDRB	33
3.4 Perkembangan PDRB per Kapita	35
IV. SEKTOR PERTANIAN	37
4.1 Gambaran Umum	37
4.2 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Pertanian	38
4.3 Tanaman Bahan Makanan	38
4.4 Tanaman Hias	40
4.5 Peternakan	40
4.6 Perikanan	41

	Halaman
V. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	43
5.1 Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam dalam Perekonomian DKI Jakarta.....	44
5.2 Industri Besar dan Sedang	46
5.3 Industri Kecil dan Rumahtangga	47
VI. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM	55
VII. SEKTOR TERSIER	60
7.1 Peranan Sektor Tersier Dalam Perekonomian DKI Jakarta	60
7.2 Sub Sektor Perdagangan dan Sub Sektor Pengangkutan	64
7.3 Sub Sektor Perbankan	72
7.4 Sektor Jasa-Jasa	72
VIII PERDAGANGAN LUAR NEGERI	74
8.1 Ekspor	74
8.2 Impor	77
 RINGKASAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pencapaian hasil pembangunan DKI Jakarta selama tahun 1994 sangat besar perannya dalam ikut memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini sangat disadari mengingat DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan pusat perdagangan, dimana sebagian besar perputaran perekonomian nasional berada di DKI Jakarta. Bahwa hasil yang dicapai pada awal PJP II sangat erat kaitannya dengan pencapaian hasil pembangunan tahapan Pelita sebelumnya.

Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan harus diperhatikan faktor dominan, antara lain perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamik serta kemungkinan pengembangannya. Sebagai konsekwensi logis dari perubahan fungsi faktor dominan yang dalam GBHN terdahulu hanya dihubungkan dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar, dalam GBHN 1993 dihubungkan dengan penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam Pelita ke VI kebijaksanaan pembangunan dijabarkan dalam kebijaksanaan bidang secara umum dan kebijaksanaan sektoral. Salah satu kebijaksanaan sektoral adalah Bidang Ekonomi, yang meliputi 18 sektor, yaitu Sektor Industri, Pertanian, Tenaga kerja, Perdagangan, Transportasi, Pertambangan, Kehutanan, Usaha nasional, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Koperasi, Pembangunan Daerah, Kelautan, Kedirgantaraan, Keuangan, Transmigrasi, Energi dan Lingkungan Hidup.

Pembangunan nasional yang kita laksanakan meliputi berbagai aspek, yaitu aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hankam. Aspek ekonomi diupayakan dengan melaksanakan pembangunan dibidang Ekonomi. Pembangunan Ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan bidang lainnya. Oleh karena itu dalam GBHN 1993, bidang ekonomi dijadikan sebagai titik berat pembangunan jangka panjang kedua, karena merupakan penggerak utama pembangunan.

Sasaran bidang Ekonomi dalam PJP II adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah pembangunan bidang ekonomi selama PJP II menetapkan antara lain :

1. Mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal berlandaskan demokrasi ekonomi, berdasarkan Pancasila.
2. Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dihasilkan melalui peningkatan pembangunan industri dan pertanian serta sektor produktif lainnya.
3. Jasa, seperti Perdagangan, Perhubungan, Kepariwisata, termasuk pula pelayanan infrastruktur dan jasa keuangan terus dikembangkan menuju terciptanya jaringan informasi. Perhubungan, Perdagangan, dan Pelayanan Keuangan yang andal efisien, mampu mendukung industrialisasi dan upaya pemerataan.
4. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan sebagai perwujudan wawasan nusantara dan sebagainya.

Hal ini terlihat pada kemajuan yang dicapai DKI Jakarta tahun 1994 yang bertepatan dengan mengawali PJP ke II, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,44 persen, ekspor meningkat 7,73 persen, dengan kontribusi ekspor non migas 94,40 persen, yang sebagian besar merupakan hasil industri (91,27 persen). Laju inflasi masih pada posisi sedikit diatas dua digit , yakni 10,56 persen yang disebabkan oleh kenaikan inflasi yang cukup tajam pada kelompok Makanan dan perumahan , yakni masing-masing 15,63 persen dan 11,32 persen .

Laju pertumbuhan penduduk berhasil ditekan hingga 2,00 persen , sedangkan angka kemiskinan yang pada tahun 1990 mencapai 7,79 persen, namun tahun 1993 berhasil diupayakan menjadi 5,65 persen. Suatu prestasi yang menggembirakan , bila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional pada tahun yang sama sebesar 13,64 persen .

Dalam PJP I yang berakhir pada Pelita V , bangsa Indonesia telah berhasil memantapkan kerangka landasan sebagai modal pangkal bagi upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri , sehingga dalam Pelita ke VI bangsa Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas .

Deregulasi dan debirokratisasi telah dilaksanakan secara bertahap sejak Repelita IV dan utamanya sejak Juni 1993 . Tujuan utamanya adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dorongan dan kemudahan-kemudahan kepada dunia usaha .

Berbagai peraturan mengenai Sektor Keuangan/Moneter dan Sektor riel yang dirasakan sebagai hambatan dan berakibat " high cost economy " secara berangsur dihapuskan atau disederhanakan .

Dengan tindakan-tindakan tersebut gairah membangun dunia usaha

meningkat . Hal ini tercermin dengan meningkatnya produksi , dan terlihat dari angka-angka kenaikan ekspor komoditi non migas. Selama Repelita VI laju inflasi diupayakan tidak melampaui 5 persen per tahun . Rasio kewajiban pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap hasil ekspor (Debt Service Ratio) diturunkan menjadi sekitar 20 persen dan pada akhir Repelita VI pendapatan per kapita diupayakan melampaui US \$.1000.-

Dipasar internasional kita berhadapan dengan pesaing dari berbagai bangsa dan negara . Maka kita dituntut untuk bekerja dan memproduksi secara efisien . Perkembangan hubungan ekonomi internasional bertambah meningkat dan meluas dengan lebih majunya teknologi, khususnya teknologi transportasi dan komunikasi. Tumbuh suburnya asosiasi atau perkumpulan negara-negara disesuatu kawasan , seperti ASEAN dengan AFTA (Asian Free Trade Area) , negara-negara Amerika Utara (Kanada, Amerika Serikat dan Mexico) dengan NAFTA (Northern America Free Trade Area) , negara-negara di Eropa dengan EEC (European Economic Community). Di lingkungan ASEAN sudah disepakai dilaksanakan AFTA , yaitu perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dalam masa 15 tahun sejak tahun 1993 dengan menerapkan CEPT (Common Effective Preferential Tariff Sceme) . Dengan terbentuknya berbagai asosiasi negara-negara sekawasan , timbul globalisasi ekonomi , ialah proses menyatunya dunia dari segi ekonomi .

Berbagai kronologi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
sebagai berikut :

1. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke 22 di Denpasar Bali Oktober 1990 menyetujui menggunakan preferensi tarif diantara negara ASEAN , menggunakan skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT) pada beberapa produk industri .
2. Pertemuan Pejabat Tinggi Senior ASEAN (SEOM) di Kuala Lumpur untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) bulan Oktober 1991 dilanjutkan dengan pertemuan AEM ke 23 di Kuala Lumpur yang menyetujui suatu kawasan perdagangan bebas dalam tempo 15 tahun .
3. Pertemuan pertama kelompok kerja Teknis (ITWG) membahas CEPT untuk AFTA di Jakarta , Desember 1991
4. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke 4 di Singapura, para kepala Pemerintahan ASEAN secara formal menetapkan AFTA dan menandatangani Deklarasi Singapura dan Kerangka Persetujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN dan menandatangani persetujuan tentang CEPT dan AFTA , Januari 1992 .
5. SEOM ASEAN membuat program usulan bagi pemotongan tarif dalam rangka AFTA , April 1992
6. ASEAN membentuk Dewan AFTA untuk mempercepat implementasi AFTA , September 1992
7. Pertemuan Dewan AFTA di Jakarta bulan Desember 1992 , menghasilkan dokumen sebagai berikut :

Prosedur Operasional untuk CEPT, Daerah Asal Barang untuk CEPT dan beberapa Catatan Interpretasi (Interpretative Notes) terhadap Persetujuan Skema CEPT untuk AFTA. Masing-masing negara ASEAN saling menukarkan daftar produk yang dimasukkan (inclusive list) dalam skema CEPT dan daftar produk yang tidak dimasukkan untuk sementara waktu (temporary exclusions)

8. AFTA secara resmi dimulai, 1 Januari 1993.
9. Pertemuan ITWG di Jakarta, 10 Juli 1993. Anggota ASEAN saling membandingkan daftar produk dan penurunan tarif .
10. Pertemuan AEM ke 25 di Singapura meneguhkan daftar skema CEPT Oktober 1993.
11. Pengumuman daftar produk dalam skema CEPT/AFTA , Nopember 1993 .
12. Pertemuan AEM ke 26 di Chiang Mai , Thailand September 1994 Disepakati tiga hal sebagai-berikut :
 - Jadwal AFTA dipercepat dari semula tahun 2008 menjadi 2003.
 - Para menteri sepakat menambah jumlah produk yang masuk dalam daftar AFTA , yang dikenal dengan Inclusion List , sehingga mengurangi daftar produk yang dikecualikan sementara (Temporary Exclusion List / TEL) dalam skema CEPT. Disepati bahwa semua produk dalam TEL dimasukkan secara bertahap selama lima tahun kedalam Inclusion List , sehingga semua produk dalam TEL sudah masuk Inclusion List pada 1 Januari 2000 .
 - AEM sepakat memasukkan semua produk pertanian yang belum diproses kedalam skema CEPT/AFTA . Namun demikian , kategori produk pertanian yang belum diproses yang dimasukkan dalam daftar sensitif (Sensitive List) akan memiliki skema liberalisasi tersendiri yang berbeda dengan skema liberalisasi tarif barang manufaktur dalam CEPT .
 - AEM menyepakati penambahan jumlah produk yang dimasukkan dalam Inclusion List. Sebelumnya terdapat 89,03 persen klasifikasi produk , akan ditambah meliputi 98 persen dari seluruh pos tarif di ASEAN pada tahun 2000.

Dari uraian tersebut diatas secara tidak langsung menggambarkan seberapa besar peran PEMDA DKI Jakarta dipasar Internasional untuk terwujudnya globalisasi ekonomi. Dalam publikasi ini diinformasikan pola kebijakan serta hasil pencapaian pembangunan DKI Jakarta tahun 1994 sesuai dengan target dan sasaran (Goal) yang diharapkan seperti tertera dalam GBHN 1989 yang dilanjutkan dengan GBHN 1993 beserta pemanfaatan dari pada era globalisasi ekonomi .

Agar kita dapat menarik manfaat dari pada era globalisasi ekonomi , kita harus memenuhi berbagai persyaratan , antara lain tingkat efisiensi dalam produksi, tingkat inflasi dan tingkat bunga yang terkendali , kelancaran dalam sistem birokrasi / administrasi , kelancaran dan efisien dalam pengangkutan dan perhubungan dan sebagainya .

BAB II TINJAUAN EKONOMI

Memasuki tahun pertama Pelita VI (1994) sebagai tahapan awal PJP II pemerintah Indonesia senantiasa berbenah diri dalam menghadapi era globalisasi, mengupayakan perekonomian semakin mantap agar tidak tergoyahkan oleh dampak perubahan perekonomian dunia yang pertumbuhannya semakin pesat. Pola perekonomian internasional tahun 1994 ditandai dengan dukungan terhadap perdagangan bebas. Bersamaan dengan menguatnya pemberlakuan sistem perdagangan bebas, keadaan ini ditunjang pula dengan semakin bangkitnya perekonomian negara-negara industri dan diperkuat pula oleh pergeseran perekonomian negara-negara berkembang kearah negara industri. Berdasarkan Tabel 2.1, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat , Kanada dan Inggris masing-masing 3,7 persen, 4,1 persen dan 3,7 persen.

Pada awal Pelita VI ini perekonomian nasional berhasil lebih dimantapkan kembali. Hal ini didukung oleh pembangunan yang cukup pesat di sektor konstruksi; listrik, gas dan air bersih; industri pengolahan serta bank dan lembaga keuangan lainnya dengan laju pertumbuhan masing-masing 14,71 persen, 12,68 persen, 11,06 persen dan 9,42 persen . Sehingga secara keseluruhan telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,34 persen. (Tabel 2.1.)

DKI Jakarta sebagai pintu gerbang pemerintahan yang sekaligus merupakan pusat perdagangan hal mana pola pembangunannya mengarah pada konstruksi; industri pengolahan serta pemantapan bank dan lembaga keuangan lainnya secara

langsung harus dapat menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan perekonomian dunia, antara lain ikut memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai pemerintah dalam keikutsertaannya dalam forum-forum regional maupun internasional, seperti ASEAN, AFTA, Gerakan Non Blok maupun forum kerja sama Asia Pasifik.

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta Menurut Sektor tahun 1994, Atas dasar harga konstan 1993 (%)

Sektor	Nasional *	DKI Jakarta
1. Pertanian	0,32	- 12,97
2. Pertambangan dan Penggalian	5,32	-
3. Industri Pengolahan	11,06	10,80
4. listrik , Gas dan Air Bersih	12,68	7,15
5. Konstruksi	14,71	7,03
6. Perdagangan , Hotel dan Restoran	9,19	7,45
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,59	5,53
8. Bank dan Lembaga Keuangan	9,42	11,24
9. Jasa - Jasa	2,93	4,61
P.D.B. dengan Migas	7,34	8,44 **
P.D.B. tanpa Migas	7,81	8,44 **

Sumber : * BPS , Maret 1995

Keterangan : ** PDRB

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Mengawali PJP II pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1994 mencapai 8,44 persen. Bila dibandingkan dengan angka nasional tahun 1994 yang mencapai 7,34 persen, maka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada peringkat yang lebih tinggi. Ditinjau dari pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada tahun 1994 sebesar 2,00 persen, maka laju pertumbuhan ekonomi jauh lebih

tinggi, sehingga pendapatan perkapita tampak semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang sangat pesat disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan pada semua sektor kecuali sektor pertanian yang terjadi penurunan sebesar 12,97 persen. Sektor keuangan; persewaan dan jasa perusahaan serta industri pengolahan mendominasi pertumbuhan ini masing-masing sebesar 11,24 persen dan 10,80 persen, sedangkan sektor yang terendah pertumbuhannya pada sektor jasa-jasa sebesar 4,61 persen, disusul sektor pengangkutan dan komunikasi 5,53 persen. (Tabel 2.2.)

Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada setiap sektor tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan peningkatan penanaman modal, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA. Penanaman modal tersebut dimanfaatkan pada sektor-sektor kegiatan ekonomi dengan urutan skala prioritas pembangunan. Dengan arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta, utamanya pada sektor keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki nilai tambah cukup besar, diharapkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selama PJP II semakin mantap dan secara tidak langsung ikut berperan serta dalam memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2.2 Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi karena dapat menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum.

Mengingat perputaran Perekonomian Nasional sebagian besar berada di DKI Jakarta , maka stabilitas ekonomi DKI Jakarta

memegang peranan strategis terhadap perekonomian Nasional . Oleh karena itu pemantauan terhadap inflasi DKI Jakarta mendapatkan perhatian yang sangat serius karena inflasi DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap laju inflasi nasional .

Penghitungan laju inflasi berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Sejak April 1990 penghitungan laju inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 27 propinsi dari hasil SBH tahun 1988/1989 di 27 ibukota propinsi. Cakupan dari survei ini meliputi 220-225 jenis barang dan jasa.

Penghitungan IHK tahun sebelumnya dengan tahun dasar 1977/1978 menggunakan hasil SBH 1977/1978 yang mencakup 150 jenis barang dan jasa merupakan gabungan dari 17 propinsi. Secara teoritis inflasi muncul jika suatu permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran. Perubahan (fluktuasi) angka ini menggambarkan seberapa besar stabilitas ekonomi, utamanya tentang harga dan daya beli masyarakat terhadap suatu barang pemenuhan kebutuhan. Oleh sebab itu pemerintah , dalam hal ini PEMDA DKI Jakarta senantiasa mengantisipasi secara terus menerus melalui pemantauan harga dan persediaan (stock) barang-barang pokok dan barang penting lainnya agar dapat dicapai stabilitas harga dan tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pemda DKI Jakarta dalam mengantisipasi pendistribusian barang dan jasa melalui penyediaan (stock) barang dan jasa serta harga dengan tujuan utamanya agar inflasi dapat dikendalikan hingga kurang dari 2 (dua) digit per tahun. Meskipun pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara guna mengendalikan inflasi tetap berada dibawah 2 digit hingga tahun 1992, namun pada tahun 1993 kenaikan inflasi cukup tajam

hingga sedikit melampaui 2 digit. Kenaikan inflasi tahun 1993 disebabkan kenaikan pada kelompok perumahan sebesar 17,74 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM bulan Januari 1993, disusul pula oleh kenaikan harga semen dan bahan bangunan. Hal lain yang mempertajam kenaikan inflasi adalah kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif beberapa jenis angkutan bulan Januari dan kenaikan tarif listrik bulan Februari 1993. Hari Raya Idul Fitri turut pula menambah tingginya inflasi bulan Maret 1993 tersebut.

Memasuki Pelita VI inflasi masih menunjukkan kenaikan, sehingga masih diatas 2 digit (10,56 persen). Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup tajam pada kelompok makanan, meskipun inflasi kelompok perumahan telah menunjukkan penurunan. Kelompok pengeluaran yang mendominasi inflasi selama tahun 1994 adalah kelompok makanan 15,63 persen dan kelompok perumahan 11,32 persen. Tingginya inflasi ini terutama disebabkan melonjaknya harga beras akibat dari kemarau panjang selama tahun 1994, sedangkan pada kelompok perumahan akibat dari kelangkaan semen dipasaran, sementara permintaannya terus meningkat akibat dari perkembangan sektor konstruksi/bangunan, sehingga harga semen dipasaran jauh diatas harga patokan setempat (HPS) yang ditetapkan pemerintah. Upaya pemerintah untuk menekan harga semen yaitu dengan melakukan operasi pasar dan meningkatkan produksi semen.

Bila ditinjau menurut tahun anggaran, inflasi tahun 1992/1993 sebesar 11,50 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1992 yakni sebesar 5,46 persen. Hal ini disebabkan karena memasuki tahun 1993 diberlakukan kebijakan pemerintah tentang

beberapa kenaikan tarif yang besar pengaruhnya terhadap kenaikan harga. Hal ini mendorong terjadinya inflasi yang cukup tinggi pada kelompok makanan 14,56 persen, perumahan 10,23 persen dan pakaian 15,99 persen (Tabel 2.3) . Sedangkan mulai tahun 1993/1994 dan 1994/1995 inflasi dapat dikendalikan hingga kurang dari 2 digit, meskipun inflasi kelompok perumahan masih tetap menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini utamanya disebabkan karena jumlah permintaan semen dan bahan bangunan lainnya jauh melampaui penyediaan barang (stock), sehingga terjadi kenaikan harga, utamanya semen.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan penyediaan/ pendistribusian barang dan jasa serta pengendalian harga perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga, baik secara langsung maupun tidak langsung serta melalui pengendalian kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan kenaikan inflasi, salah satunya adalah kebijakan kenaikan harga dan penyesuaian tarif.

TABEL 2.2 LAJU INFLASI DKI JAKARTA MENURUT KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN, 1992-1994 (%)

KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN	1992	1993	1994
A. Makanan	7,30	4,63	15,63
B. Perumahan	3,99	17,74	11,32
C. Pakaian/Sandang	12,49	8,27	8,55
D. Aneka Barang dan Jasa	2,59	8,48	5,43
U m u m	5,46	10,28	10,56

TABEL 2.3 LAJU INFLASI DKI JAKARTA MENURUT KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN, 1992/1993 - 1994/1995 (%)

KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN	1992/1993	1993/1994	1994/1995
A. Makanan	14,56	6,68	10,93
B. Perumahan	10,23	11,58	12,31
C. Pakaian/Sandang	15,99	9,26	5,42
D. Aneka Barang dan Jasa	8,24	2,49	6,13
U m u m	11,50	7,29	9,47

2.3. Ekspor dan Impor

a. Kebijakan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

Memasuki tahun pertama Repelita VI, kebijaksanaan dibidang perdagangan luar negeri tetap diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas industri dalam negeri, mendorong pengembangan ekspor nonmigas, memelihara kestabilan harga dan tersedianya barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja dan menghemat devisa impor. Disamping itu, untuk menunjang peningkatan ekspor non migas, nilai tukar rupiah yang realistis perlu dipertahankan. Selanjutnya, guna lebih mendorong penanaman modal asing (PMA), khususnya yang berorientasi ekspor maka iklim usaha dan prasarana perlu ditingkatkan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang cukup pesat, hal mana didukung oleh meningkatnya pembangunan di sektor industri pengolahan; bank dan lembaga keuangan lainnya; konstruksi; perhubungan dan komunikasi, ditunjang oleh pesatnya sarana/fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara.

Data ekspor dan impor dalam bahasan ini adalah mencakup semua barang ekspor dan impor melalui pelabuhan muat di DKI Jakarta dan Pelabuhan udara Sukarno Hatta, baik yang digunakan di DKI Jakarta maupun keluar wilayah DKI Jakarta.

b. Ekspor

Perkembangan ekspor DKI Jakarta sejak tahun 1989 hingga tahun 1994 meningkat dari 4 614,58 juta US \$ menjadi 12 870,55 juta US \$. Pertumbuhan ekspor sejak 1990 hingga 1992 senantiasa

meningkat dari sekitar 2,6 persen menjadi 40 persen per tahun, namun tahun 1993 persentase kenaikan menurun menjadi sekitar 12 persen dan bahkan tahun 1994 menjadi menjadi sekitar 8 persen.

Rata-rata volume ekspor DKI Jakarta sejak tahun 1989 hingga 1994 mencapai 9 925,17 juta ton, sedangkan ekspor nasional 146 606,85 juta ton . Bila dibandingkan dengan ekspor nasional, kontribusi ekspor DKI Jakarta sejak 1989 hingga 1994 berfluktuasi dari 9,57 persen pada tahun 1989 menjadi 4,57 persen pada tahun 1994, sedangkan rata-rata per tahun 6,77 persen. Rata-rata nilai ekspor sejak tahun 1989 hingga 1994 8 912,44 juta US \$, sedangkan rata-rata nasional 31 303,33 juta US \$, dan andil rata-rata pertahun 28,47 persen.

Volume ekspor DKI Jakarta tahun 1994 sebagian besar merupakan ekspor migas (6 351,88 juta ton), sedangkan ekspor non migas 3 957,18 juta ton. Ekspor non migas terutama dari hasil industri mencapai 3 697,05 juta ton dengan nilai 11 746,34 juta US \$. Nilai ekspor hasil industri mendominasi ekspor DKI Jakarta dengan kontribusi 96,68 persen terhadap total ekspor non migas dan merupakan 91,27 persen terhadap total ekspor termasuk migas.

c. Impor

Upaya pemerintah dalam menghemat devisa impor dilaksanakan dengan meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan efisiensi, stabilitas harga, serta tersedianya barang-barang yang dibutuhkan didalam negeri dimaksudkan guna memelihara stabilitas neraca perdagangan luar negeri. Barang-barang yang dapat memacu pertumbuhan industri serta merupakan kebutuhan mendesak tetap diberikan kelonggaran untuk impor.

Nilai impor DKI Jakarta tahun 1992 hingga 1994 berkisar antara 15 497,49 juta US \$ hingga 20 298,23 juta US \$, sehingga terjadi kenaikan rata-rata sekitar 15,17 persen per tahun. Jepang mendominasi impor utama barang-barang di DKI Jakarta, yang sejak tahun 1992 hingga 1994 mencapai 4 096,96 juta US \$ (26,40 persen), kemudian meningkat menjadi 6 229,65 juta US \$ (30,84 persen). Impor dari negara-negara ASEAN, terutama dari Singapura 5,27 persen. Impor lainnya dari Amerika Serikat pada tahun 1992 hingga 1994 berkisar antara 1 599 juta US \$ hingga 1 854 juta US \$. Berdasarkan Tabel 8.9, dapat dijelaskan bahwa nilai impor masih menunjukkan kenaikan sejak tahun 1992 hingga 1994 dengan kenaikan rata-rata 15,17 persen pertahun dan negara importir utamanya adalah Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.

2.4. Neraca Perdagangan Luar Negeri

Neraca perdagangan DKI Jakarta sejak tahun 1989 hingga 1994 masih menunjukkan defisit. Secara riil selisih perdagangan berfluktuasi antara 4,5 hingga 8 milyar US \$. Meskipun DKI Jakarta sudah berusaha keras meningkatkan ekspor yang terbukti dari pertumbuhan rata-rata 35,78 persen pertahun, namun dibarengi pula dengan meningkatnya nilai impor dengan pertumbuhan rata-rata 24,36 persen pertahun, nilai tersebut secara riil menunjukkan bahwa impor masih lebih besar dibandingkan ekspor, sehingga neraca perdagangan masih menunjukkan defisit. Defisit neraca perdagangan tahun 1990 mencapai 7 218,16 juta US \$, meningkat hampir dua kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 1991 masih terlihat ada kenaikan kemudian berkurang, dan baru pada tahun 1994 terlihat mengalami peningkatan lagi.

Persentase defisit neraca perdagangan setelah meningkat pada tahun 1990 sekitar 125 persen, berangsur dapat ditekan hingga 56,93 persen pada tahun 1994.

Dari uraian diatas dapat kita telaah bahwa dengan meningkatnya sektor industri akan meningkat pula ekspor, utamanya hasil industri. Meskipun terjadi peningkatan nilai impor, namun persentase defisit neraca perdagangan sejak tahun 1990 menunjukkan penurunan.

TABEL 2.4. NERACA PERDAGANGAN DKI JAKARTA
(Juta US \$)

TAHUN	Ekspor *)	Impor	Selisih Perdagangan	Defisit (persen)
1989	4 614,58	9 106,60	4 483,69	97,16
1990	5 793,46	13 011,62	7 218,16	124,59
1991	7 609,66	15 493,55	7 883,89	103,60
1992	10 638,90	15 497,49	4 858,59	45,67
1993	11 947,52	16 891,43	4 943,91	41,38
1994	12 870,54	20 198,23	7 327,69	56,93

Sumber: - Statistik Ekspor BPS.

*) Termasuk MIGAS.

2.5. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi disegala bidang diperlukan penanaman modal, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA. Sejak tahun 1991 hingga 1994 banyaknya modal yang ditanamkan di DKI Jakarta senantiasa meningkat, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA.

Besarnya modal dalam negeri yang ditanamkan 1991 hingga 1994 sebesar 3 176,56 milyar rupiah meningkat menjadi 6.452,70 milyar rupiah, dengan pertumbuhan rata-rata 34,38 persen per tahun, sedangkan besarnya penanaman modal asing ke DKI Jakarta meningkat dari 759.77 juta US \$ menjadi 1 355.90 juta US \$, dengan pertumbuhan rata-rata 26,15 persen per tahun.

Bila ditinjau menurut lapangan usaha, dana PMDN lebih diutamakan pada sektor jasa-jasa lainnya, industri, perhotelan, real estate dan bangunan dengan persentase masing-masing 33,90 persen, 22,54 persen, 20,69 persen, 15,12 persen dan 7,75 persen.

Seperti halnya PMDN, dana PMA diprioritaskan pada sektor yang sama, dengan urutan prioritas pada sektor industri, real estate dan sektor-sektor lainnya dengan persentase masing-masing 42,19 persen, 32,28 persen dan 25,53 persen.

Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sektor industri memperoleh prioritas utama dalam memperoleh kesempatan dana PMDN maupun PMA sehingga pertumbuhan sektor industri sangat pesat yang selanjutnya dapat memacu pertumbuhan ekspor non migas. Ini terbukti dengan tingginya ekspor hasil industri yang mencapai 90 persen terhadap ekspor non migas. Dengan pertumbuhan nilai ekspor yang sedemikian pesat maka mengurangi defisit neraca perdagangan, disamping itu juga meningkatkan pertumbuhan PDRB DKI Jakarta.

TABEL 2.5 : PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TAHUN 1991-1994
(Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	1991	1992	1993	1994
PERTANIAN	9,13	-	-	-
INDUSTRI	587,52	928,64	385,76	1 454,30
BANGUNAN	217,16	98,28	8,06	500,4
PERHOTELAN	827,79	797,13	516,96	1 334,9
REAL ESTATE	884,92	1 277,30	2 988,49	975,9
JASA-JASA LAINNYA	650,03	897,96	3 239,00	2 187,2
J U M L A H	3 176,56	3 999,31	7 138,28	6 452,7

Sumber : Jakarta Dalam Angka 1995

TABEL 2.6 : PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TAHUN 1991-1994
(Juta US \$.)

LAPANGAN USAHA	1991	1992	1993	1994
PERTANIAN	1,20	-	-	-
INDUSTRI	227,52	214,61	125,31	572,00
BANGUNAN	26,40	17,59	32,70	67,40
PERHOTELAN	143,00	323,25	111,59	88,60
REAL ESTATE	281,91	461,36	153,60	437,70
JASA-JASA LAINNYA	79,74	74,20	743,52	190,20
J U M L A H	759,77	1 091,00	1 166,73	1 355,90

Sumber : Jakarta Dalam Angka 1995

2.6. Produksi Beras

Swasembada pangan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan stabilitas nasional. Hal ini disadari benar oleh pemerintah, mengingat beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk itu Pemda DKI Jakarta dalam peranannya ikut mensukseskan swasembada pangan melalui Dolog, setiap saat senantiasa memantau situasi beras di DKI Jakarta dalam hal pengamanan persediaan (stock) beras setiap tahun, peningkatan produksi beras melalui usaha intensifikasi dan non intensifikasi, hingga penentuan harga dasar gabah di pasaran agar tidak merugikan petani sebagai produsen beras, sekaligus tidak memberatkan konsumen beras.

Wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota propinsi dan pusat pemerintahan masih memiliki lahan pertanian, baik berupa sawah maupun tanah kering yang oleh penduduk dimanfaatkan secara optimal untuk ditanami padi, sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias. Meskipun areal pertanian setiap tahun menyusut, namun karena diupayakan peningkatan pola tanam intensifikasi, maka produksi padi setiap tahun tidak menunjukkan penurunan yang sangat berarti. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.7. dan 2.8.

Produksi beras selama periode 1989-1994 berkisar antara 24 488 hingga 39 174 ton per tahun. Pada tahun 1989 produksi beras 34 693 ton , dan pada tahun 1994 menjadi 33 181 ton.

Upaya pemerintah dalam hal campur tangan mengenai pengendalian beras senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sebagai penghasil beras. Secara berkala harga dasar gabah kering giling dinaikkan , dan terhitung 1 Januari 1994 dinaikkan sebesar 5,88 persen. Namun sangat

disayangkan bahwa naiknya harga dasar gabah selalu diikuti oleh naiknya komponen produksi pertanian, seperti pupuk dan pestisida.

Bila laju perkembangan harga jasa dan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh petani lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan petani, maka peningkatan kesejahteraan petani akan tertinggal dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan sektor lainnya. Sehingga nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daya beli petani tetap tertinggal dibandingkan dengan perkembangan kenaikan biaya kebutuhan petani.

Sejalan dengan proses pembangunan yang semakin meningkat, maka terjadi pergeseran fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Bila hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan teknologi pertanian atau pergeseran angkatan kerja ke sektor non pertanian akan mengakibatkan persentase petani kecil semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa persentase sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB DKI Jakarta semakin kecil dan pada tahun 1994 tercatat 0,24 persen.

Akhirnya dapat diinformasikan bahwa, walaupun areal pertanian DKI Jakarta setiap tahun senantiasa menciut yang disebabkan pergeseran fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian, namun DKI Jakarta senantiasa turut andil dalam meningkatkan stabilitas nasional melalui swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan secara optimal dan pengendalian harga 9 bahan pokok, utamanya beras.

**TABEL 2.7. LUAS LAHAN PERTANIAN MENURUT JENIS TANAH
1990-1994 (Ha)**

TAHUN	JENIS TANAH		JUMLAH	% PERUBAH- AN
	TANAH SAWAH	TANAH DARAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	6 092,00	12 953,50	19 045,50	-
1991	5 649,00	11 462,46	17 109,46	- 10,16
1992	4 922,00	9 809,30	14 731,30	- 13,90
1993	4 333,00	9 085,70	13 418,70	- 8,91
1994	3 764,00	8 760,83	12 524,83	- 6,66

TABEL 2.8. LUAS PANEN DAN PRODUKSI BERAS 1989-1994

TAHUN	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1989	8 677	34 693	4,396
1990	8 759	39 174	4,472
1991	5 806	27 474	4,732
1992	6 740	31 433	4,664
1993	6 102	28 488	4,669
1994	4 820	33 181	6,884
J U M L A H	40 904	194 443	4,754

2.7. Pemerataan Pembangunan

Dalam Pelita VI kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan tetap pada unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya . Pelaksanaan GBHN sejak Pelita III sampai saat ini , azas pemerataan menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap mendapat prioritas utama dengan melanjutkan Delapan Jalur Pemerataan, diantaranya:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan .
2. Pemerataan pembagian pendapatan , dan lain sebagainya .

Laju pembangunan selama PJP II sebagai era peningkatan sumber daya manusia (SDM), pada akhirnya laju pembangunan sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas SDM .

Salah satu masalah yang sudah dicanangkan untuk segera ditanggulangi adalah pengurangan kemiskinan . Seperti diketahui , angka nasional dewasa ini dinyatakan terdapat 27 juta orang berada dibawah garis kemiskinan .

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama tahun 1994 sebesar 8,44 persen , bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 2,00 persen membawa dampak angka pertumbuhan per kapita meningkat cukup tajam .

Berdasarkan hasil SUSENAS 1994 pendapatan per kapita atas dasar harga konstan 1993 sejak tahun 1990 hingga `1993 meningkat dari 4 845,12 ribu rupiah menjadi 5 855,56 ribu rupiah .

Peningkatan pendapatan ini disusul oleh perubahan pola konsumsi kelompok makanan dan non makanan. Pada Tabel 2.9. tertera pergeseran persentase pengeluaran makanan menurun, sedangkan

persentase pengeluaran non makanan menunjukkan peningkatan. Namun disisi lain, berdasarkan data pemasukkan daging menunjukkan konsumsi daging meningkat lebih 200 persen.

Pembagian pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk lapisan bawah (terendah) sejak tahun 1990 hingga 1993 menurun dari 22,56 persen menjadi 21,06 persen, dan 40 persen menengah menunjukkan sedikit penurunan, sedangkan 20 persen tertinggi menunjukkan kenaikan dari 40,62 persen menjadi 42,44 persen. Menurut versi Bank Dunia, tingkat ketimpangan dapat dikatakan rendah bila total pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah lebih dari 17 persen total pendapatan.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 hingga 1993 tingkat ketimpangan rendah, dan persentase penerimaan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan Rendah serta 40 persen penduduk berpenghasilan Menengah menurun, sementara persentase penerimaan 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi menunjukkan kenaikan yang cukup berarti.

Hal ini dapat pula disimak dari angka Gini Ratio yang bergeser dari 0,30 menjadi 0,42 persen. Indikator Gini Ratio menyebutkan bahwa ketimpangan minimum bila angka Gini Ratio mendekati angka nol, dan kesenjangan makin melebar bila angka Gini Ratio mendekati satu. Berdasarkan Gini Ratio sebaiknya bila 10 persen penduduk lapisan bawah memperoleh 10 persen dari total pendapatan. Selanjutnya kepincangan terjadi bila 10 persen penduduk lapisan atas memperoleh pendapatan melebihi 10 persen total pendapatan. Semakin tinggi lapisan teratas menikmati persentase dari total pendapatan, maka kesenjangan pembagian

pendapatan antar lapisan masyarakat semakin melebar. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa kesenjangan pembagian pendapatan sejak tahun 1990 hingga tahun 1993 semakin melebar .

Batas kemiskinan pada periode yang sama meningkat dari 29 746 menjadi 39 530 rupiah per kapita per bulan , sedangkan jumlah penduduk miskin menurun dari 603,3 menjadi 497,1 ribu .Persentase penduduk miskin bergeser dari 7,79 persen menjadi 5,65 persen .

Demikianlah hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam mengakhiri Pelita V dan dalam mengawali Pelita VI bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi , selain mengurangi angka kemiskinan , juga disertai pemerataan pendapatan bagi segenap lapisan masyarakat . Namun di sisi lain penghasilan sebagian kecil penduduk berpenghasilan tinggi meningkat hampir 2 persen dari total pendapatan, sedangkan penduduk berpenghasilan menengah yang merupakan mayoritas persentasenya menurun, bahkan yang berpenghasilan rendah persentasenya menurun pula hingga 1,2 persen . Disamping itu dapat pula diinformasikan bahwa semakin melebarnya kesenjangan pemerataan pendapatan tidak berarti bahwa penduduk semakin miskin . Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya batas miskin per kapita per bulan dan menurunnya persentase penduduk miskin .

**TABEL 2.9. PENDAPATAN PER KAPITA, PERSENTASE PENGELUARAN
RATA-RATA PER KAPITA, PEMBAGIAN PENDAPATAN,
DAN KEMISKINAN, 1990 - 1993**

URAIAN	1990	1993
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	9,84	9,57
2. Pendapatan per kapita, Harga Konstan 1993 (000 Rp)	4 845,12	5 855,56
3. Persentase Pengeluaran Rata-rata per kapita sebulan :		
a. Makanan	43,81	42,77
b. Non Makanan	56,19	57,23
4. Pembagian Pendapatan		
a. 40 persen Terrendah	22,56	21,06
b. 40 persen Menengah	36,82	36,50
c. 20 persen Tertinggi	40,62	42,44
5. Gini Ratio	0,30	0,42
6. Kemiskinan		
a. Batas Miskin (Rp/Kapita/Bulan)	29 746	39 530
b. Jumlah Penduduk Miskin (000)	603,3	497,1
c. Persentase Penduduk Miskin	7,79	5,65

Sumber : Hasil SUSENAS 1994 .

BAB III PENDAPATAN REGIONAL DKI JAKARTA

3.1. Gambaran Umum .

Dalam GBHN 1993 bidang ekonomi dijadikan sebagai titik berat PJP II , karena merupakan penggerak utama pembangunan . Deregulasi dan Debirokratisasi telah dilaksanakan secara bertahap sejak Repelita IV dan utamanya sejak Juni 1993 . Tujuan utamanya adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dorongan dan kemudahan-kemudahan kepada dunia usaha .

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1994 yang dihitung dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993, tercatat sebesar 8,44 persen. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 7,34 persen .

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun pertama pelaksanaan Pelita VI ini ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk tahun yang sama sebesar 2.00 persen, sehingga terdapat kenaikan nyata dari pendapatan regional per kapita 1994.

Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu ternyata tidak terlepas dari beberapa sektor yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian DKI Jakarta. Beberapa sektor dimaksud adalah Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan; Perdagangan, Hotel & Restoran; serta Industri Pengolahan. Diduga, berbagai paket kebijaksanaan pemerintah yang telah dikeluarkan selama ini dapat menciptakan iklim untuk merangsang peningkatan kegiatan ekonomi, khususnya di DKI Jakarta.

3.2. Perkembangan Ekonomi Sektoral dan Peranannya.

Untuk mengetahui lebih jauh pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta seperti telah diuraikan diatas, perlu dilihat laju pertumbuhan masing-masing sektornya. Dari Tabel 3.1 tampak bahwa pada tahun 1994 atas dasar harga konstan 1993, Sektor Pertanian menunjukkan penurunan sebesar 12,97 persen. Penurunan yang terjadi pada sektor ini disebabkan karena adanya penurunan produksi beberapa jenis komoditi tanaman bahan makanan dan peternakan. Diantara beberapa jenis komoditi yang berpengaruh besar terhadap penurunan nilai tambah pertanian adalah padi yang mengalami penurunan produksi dari 28 488 ton pada tahun 1993 menjadi 22 465 ton tahun 1994, jagung turun dari 52 ton pada tahun 1993 menjadi 20 ton tahun 1994, ketela pohon turun dari 879 ton pada tahun 1993 menjadi 806 ton tahun 1994, ketela rambat turun dari 45 ton pada tahun 1993 menjadi 33 ton tahun 1994, dan kacang tanah turun dari 28 ton pada tahun 1993 menjadi 7 ton tahun 1994.

Berbeda dengan Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan pada tahun 1994 secara mengesankan mengalami pertumbuhan sebesar 10,80 persen. Tingginya pertumbuhan yang dialami sektor ini disebabkan oleh tingginya kenaikan nilai tambah bruto pada industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 23,42 persen, industri alat angkutan, mesin dan peralatannya sebesar 19,83 persen dan industri barang galian bukan logam sebesar 15,33 persen. Sedangkan jenis industri lainnya hanya mengalami kenaikan di bawah 7,00 persen, bahkan industri logam dasar dan baja mengalami penurunan sebesar 3,75 persen.

Selain Sektor Industri Pengolahan, beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan; Perdagangan, Hotel & Restoran; Listrik, Gas & Air Bersih; serta Bangunan masing-masing mengalami kenaikan sebesar 11,24 persen, 7,45 persen, 7,15 persen dan 7,03 persen. Sedangkan sektor lainnya seperti Pengangkutan dan Komunikasi serta Jasa-jasa masing-masing hanya mengalami kenaikan sebesar 5,53 persen dan 4,61 persen.

TABEL 3.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DKI JAKARTA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1994 (Persen)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	- 1,31	- 12,97
2. Industri Pengolahan	17,30	10,80
3. Listrik, Gas & Air Bersih	11,71	7,15
4. Bangunan	20,00	7,03
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	16,94	7,45
6. Pengangkutan & Komunikasi	8,53	5,53
7. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	21,93	11,24
8. Jasa-jasa	13,00	4,61
P D R B	17,24	8,44
INDONESIA *)	14,43	7,34
INDONESIA **)	16,52	7,81

*) Dengan migas

***) Tanpa migas.

Adanya perubahan klasifikasi sektor serta perbedaan laju pertumbuhan antar sektor, telah menyebabkan kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian DKI Jakarta mengalami sedikit pergeseran. Pada tahun 1993-1994, Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan merupakan sektor paling dominan di DKI Jakarta, walaupun secara subsektor, Industri Pengolahan masih memegang peranan terbesar.

Dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (Tabel 3.2) terlihat bahwa peranan Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan pada tahun 1993 adalah sebesar 22,38 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 23,28 persen pada tahun 1994. Adanya kenaikan peranan sektor ini terhadap PDRB karena adanya kenaikan nilai tambah bruto yang tinggi pada Subsektor Bank sebagai pemasok utama sektor ini, yaitu sebesar 12,64 persen, sehingga peranannya terhadap PDRB naik dari 12,18 persen pada tahun 1993 menjadi 12,81 persen tahun 1994.

Selain Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, sektor-sektor yang juga memiliki peran terbesar dalam perekonomian DKI Jakarta adalah Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran serta Industri Pengolahan. Pada tahun 1993, peranan Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran serta Industri Pengolahan masing-masing sebesar 22,19 persen dan 21,49 persen. Sejalan dengan adanya perbedaan laju pertumbuhan pada semua sektor, peranan kedua sektor di atas mengalami sedikit pergeseran pada tahun 1994. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sedikit mengalami penurunan menjadi 22,13 persen, sebaliknya Sektor Industri Pengolahan naik menjadi 21,50 persen.

Selanjutnya sektor lain yang peranannya mengalami kenaikan adalah Sektor Bangunan dari 13,04 persen pada tahun 1993 menjadi 13,35 persen tahun 1994. Sebaliknya sektor-sektor seperti Pertanian; Listrik, Gas & Air Bersih; Pengangkutan & Komunikasi; serta Jasa-jasa mengalami penurunan masing-masing dari 0,30 persen, 1,68 persen, 8,89 persen dan 10,01 persen pada tahun 1993 menjadi 0,25 persen, 1,60 persen, 8,23 persen dan 9,65 persen pada tahun 1994.

Berdasarkan harga konstan 1993, Sektor Industri Pengolahan serta Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan mengalami kenaikan dalam struktur perekonomian DKI Jakarta. Sebaliknya Sektor Pertanian; Listrik, Gas & Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel & Restoran; Pengangkutan & Komunikasi serta Jasa-jasa menurun peranannya.

TABEL 3.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB DKI JAKARTA, TAHUN 1993 DAN 1994 (Persen).

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 1993	
	1993	1994	1993	1994
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	0,30	0,25	0,30	0,24
2. Industri Pengolahan	21,49	21,50	21,49	21,96
3. Listrik, Gas & Air Bersih	1,68	1,60	1,68	1,66
4. Bangunan	13,04	13,35	13,04	12,87
5. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,19	22,13	22,19	21,99
6. Pengangkutan & Komunikasi	8,89	8,23	8,89	8,66
7. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	22,38	23,28	22,38	22,96
8. Jasa-jasa	10,01	9,65	10,01	9,66
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3. Perkembangan Komponen-komponen Penggunaan PDRB.

Perkembangan perekonomian DKI Jakarta yang ditunjukkan oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto, lebih lanjut dapat dilihat pula dari perkembangan masing-masing komponen penggunaannya.

Berdasarkan harga konstan 1993 (Tabel 3.3.), pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 3,26 persen, demikian pula pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 7,83 persen. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap domestik bruto masing-masing mengalami kenaikan sebesar 6,95 persen dan 4,71 persen, sedangkan ekspor dan impor barang dan jasa masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7,07 persen dan 2,23 persen.

TABEL 3.3. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 1994 (Persen)

Penggunaan/Konsumsi	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumahtangga	14,55	3,26
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	18,27	7,83
3. Konsumsi Pemerintah	13,09	6,95
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	13,28	4,71
5. Perubahan Stok	10,76	4,65
6. Ekspor Barang & Jasa	17,19	7,07
7. Impor Barang & Jasa	13,32	2,23
P D R B	17,25	8,44

Perkembangan nyata dari masing-masing komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto yang cukup beragam, telah membawa perubahan pada komposisinya terhadap produk domestik regional bruto. Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa berdasarkan harga berlaku, penggunaan Produk Domestik Regional Bruto untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga turun dari 35,23 persen pada tahun 1993 menjadi 34,42 persen pada tahun 1994. Sebaliknya konsumsi lembaga swasta nirlaba naik dari 2,98 persen pada tahun 1993 menjadi 3,01 persen pada tahun 1994, sedangkan proporsi pengeluaran konsumsi pemerintahan mengalami penurunan dari 6,92 persen pada tahun 1993 menjadi 6,67 persen pada tahun 1994.

Sementara itu proporsi komponen lainnya seperti pembentukan modal tetap domestik bruto, ekspor dan impor mengalami penurunan masing-masing dari 39,26 persen, 89,13 persen dan 76,52 persen pada tahun 1993 menjadi 37,93 persen, 89,09 persen dan 73,95 persen pada tahun 1994.

Berdasarkan harga konstan 1993, seluruh komponen penggunaan mengalami penurunan, hal ini dapat terjadi mengingat laju pertumbuhan masing-masing komponen penggunaan PDRB lebih kecil dibanding laju pertumbuhan PDRB.

**TABEL 3.4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 1993-1994
(Persen)**

Penggunaan/Konsumsi	Harga Berlaku		Harga Konstan 1993	
	1993	1994	1993	1994
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah tangga	35,23	34,42	35,23	33,54
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,98	3,01	2,98	2,96
3. Konsumsi Pemerintah	6,92	6,67	6,92	6,82
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	39,26	37,93	39,26	37,91
5. Perubahan Stok	3,00	2,83	3,00	2,90
6. Ekspor Barang & Jasa	89,13	89,09	89,13	88,01
7. Dikurangi Impor Barang & Jasa	76,52	73,95	76,52	72,14
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00

3.4. Perkembangan PDRB per Kapita.

Perkembangan PDRB per kapita tentunya tidak terlepas dari angka-angka PDRB yang telah diuraikan sebelumnya. Kalau PDRB atas dasar harga konstan 1993 mengalami kenaikan 8,44 persen pada tahun 1994, maka PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 mengalami kenaikan sebesar 6,32 persen, yaitu dari Rp 5.855.564.- pada tahun 1993 menjadi Rp 6.225.564.- pada tahun 1994.

Dibanding laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,00 persen pada tahun 1994, terlihat jelas angka pertumbuhan PDRB per kapita masih jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah mampu menaikkan tingkat pendapatan penduduk DKI Jakarta.

Demikian pula dari harga berlaku, PDRB per kapita juga menunjukkan kenaikan, yaitu dari Rp 5.855.564.- pada tahun 1993 menjadi Rp 6.731.126.- pada tahun 1994 (Tabel 3.5).

TABEL 3.5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA, TAHUN 1993 - 1994

TAHUN	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN 1993	
	PDRB perkapita (rupiah)	Kenaikan (%)	PDRB perkapita (rupiah)	Kenaikan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1993	5 855 564	-	5 855 564	-
1994	6 731 126	14,95	6 225 564	6,32

BAB IV SEKTOR PERTANIAN

4.1. Gambaran Umum

Sektor Pertanian merupakan salah satu unsur penunjang dalam meningkatkan stabilitas nasional melalui swasembada pangan. Sektor ini selain menyediakan pangan bagi penduduk juga menyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk serta menjadi sumber penghasil devisa negara melalui ekspor non migas.

Dalam pembangunan jangka panjang (PJP) I sektor pertanian merupakan prioritas pembangunan dalam bidang ekonomi, yang mencakup program peningkatan produksi serta unsur-unsur penunjangnya seperti program penelitian, pengembangan prasarana irigasi dan jalan serta kebijaksanaan harga pangan. Kemajuan yang dicapai disektor Pertanian selama PJP I telah membawa dampak yang positif dengan dicapainya swasembada beras pada tahun 1984. Secara bertahap melalui setiap repelita, pembangunan lebih diarahkan kesektor lainnya. Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai telah terjadi pergeseran-pergeseran yang mengantarkan negara kita dari agraris kearah industri.

Mengingat kondisi geografisnya serta peranan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan telah membawa pergeseran perubahan fungsi tanah dari lahan pertanian ke non Pertanian sehingga di DKI Jakarta tidak ada sub sektor Perkebunan dan Kehutanan. Dengan demikian sektor Pertanian di DKI Jakarta hanya meliputi sub sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan, Peternakan, Perikanan serta ditambah dengan Tanaman Hias.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang cepat telah mengakibatkan menciutnya lahan pertanian ke sektor non Pertanian. Hal ini mengakibatkan produksi pangan di DKI Jakarta kurang memenuhi kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta dan kebutuhan ini dipenuhi dari BOTABEK dan sekitarnya. Sehingga secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta telah mendorong pertumbuhan BOTABEK dan sekitarnya, khususnya di sektor Pertanian.

4.2 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Pertanian

Secara sektoral peranan sektor Pertanian di DKI Jakarta paling kecil dibandingkan dengan sektor non Pertanian. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB DKI Jakarta tahun 1994 sebesar 0,24 persen, dengan pertumbuhan -12,97 persen. Kontribusi tersebut merupakan penggabungan dari subsektor Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Hias, Peternakan dan Perikanan masing-masing 0,12 persen, 0,03 persen, 0,03 persen dan 0,06 persen dengan pertumbuhan pertahun masing-masing -23,21 persen, 6,83 persen, -1,76 persen dan 0,01 persen.

4.3 Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor tanaman bahan makanan mendominasi peranannya (50%) terhadap sektor Pertanian dalam sumbangannya terhadap PDRB DKI Jakarta.

Produksi tanaman bahan makanan di DKI Jakarta meliputi bahan makanan pokok, sayur-sayuran dan buah-buahan. Bila dibandingkan dengan tahun 1993, nilai produksi tanaman bahan makanan turun 23,21 persen. Bahan makanan pokok terdiri dari padi, jagung,

ketela pohon dan kacang tanah dengan luas panen masing-masing 4.820 ha, 44 ha, 64 ha dan 10 ha, sedangkan produksinya masing-masing 33.181 ton, 102 ton, 883 ton dan 22 ton.

Jenis sayuran yang banyak diproduksi adalah kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, mentimun dan lain sebagainya dengan luas panen masing-masing 1.881 ha, 807 ha, 390 ha, 143 ha dan 73 ha. Kangkung mendominasi produksi sayuran di DKI Jakarta dengan produksi per tahun 20.000 ton, diikuti bayam, sawi dan kacang panjang dengan produksi pertahun masing-masing 6.960 ton, 3.071 ton, 931 ton dan 495 ton, sedangkan sayuran lainnya yang terdiri dari terung, lobak daun, cabe, tomat, selada, peterseli dan lainnya secara keseluruhan bila dijumlahkan mencapai 5.000 ton.

Produksi buah-buahan di DKI Jakarta didominasi oleh pepaya, rambutan, pisang dan belimbing serta mangga dan jambu air dengan produksi masing-masing 14.454 ton, 11.967 ton, 4.972 ton, 3.524 ton, 2.301 ton dan 2.142 ton. Buah-buahan lainnya terdiri dari salak, duku, durian, sawo, nenas, apokat dan lainnya, masing-masing kurang dari 2.000 ton per tahun. Bila dibandingkan tahun 1993, perkembangan produksi pepaya tahun 1994 sebesar 271,8 persen, rambutan 49,5 persen, belimbing 8,6 persen dan mangga 185 persen. Beberapa produksi yang mengalami penurunan antara lain pisang 48,3 persen, duku 93,3 persen dan jambu biji 66,7 persen. Untuk jenis buah-buahan lainnya menunjukkan perkembangan yang kurang berarti.

4.4 Tanaman Hias

Kontribusi tanaman hias terhadap PDRB DKI Jakarta sebesar 0,03 persen. Angka tersebut merupakan 12,5 persen dari seluruh pendapatan dari sektor pertanian. Nilai produksi tanaman hias tahun 1994 mengalami kenaikan 6,83 persen. Angka tersebut dimungkinkan mengingat pertumbuhan sektor konstruksi dan secara umum pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta cukup pesat. Tanaman hias yang diproduksi terdiri dari tanaman hidup dan bunga. Produksi bunga yang paling dominan perkembangannya adalah bunga anggrek sebanyak 4.147 ribu pohon dengan produksi 12.114 ribu tangkai.

4.5 Peternakan

Seperti halnya tanaman hias, kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB DKI Jakarta 0,03 persen, namun pertumbuhannya mengalami penurunan 1,76 persen bila dibandingkan tahun 1993.

Luas tempat usaha peternakan yang meliputi usaha sapi perah, ayam, kerbau, babi, kambing/domba dan itik meliputi 394 450 m². Dari luas areal tersebut 52,92 persen digunakan untuk peternakan babi yang keseluruhannya berada di Jakarta Barat. Luas areal tempat usaha sapi perah 19,45 persen, ayam 17,17 persen dan lainnya terdiri dari kerbau, kambing dan itik. Areal sapi perah 68,99 persen berada di Jakarta Selatan, 24,85 persen di Jakarta Timur, lainnya tersebar di wilayah lainnya. Usaha peternakan ayam sekitar 82,19 persen berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Secara umum populasi ternak menunjukkan penurunan yang sangat tajam, terutama usaha peternakan ayam. Pada tahun 1990 populasi ayam ras dan ayam buras sekitar 957 363 ekor, sedangkan tahun 1994 menjadi 335 231 ekor, yang berarti terjadi penurunan rata-rata 16,24 persen per tahun. Seperti halnya populasi ternak, maka produksi telur dan ayam potong menunjukkan penurunan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan daging hewan yang setiap tahun senantiasa meningkat perlu didatangkan dari daerah lain.

Bila tahun 1990 pemasukan daging ke DKI Jakarta 1 205,7 ton, maka tahun 1994 menjadi 11 721,1 ton, yang berarti terjadi peningkatan pemasukan daging rata-rata 218,03 persen per tahun. Bila laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1994 tercatat 8,44 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,00 persen, berarti terdapat kenaikan yang nyata pada pendapatan regional per kapita. Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan pula bahwa kenaikan pendapatan per kapita diikuti pula dengan peningkatan konsumsi daging.

4.6 Perikanan

Mengingat letak geografis DKI Jakarta yang berbatasan dengan laut Jawa disebelah Utara, dengan ditunjang oleh alat penangkap ikan yang semakin handal, maka rata-rata produksi ikan per bulan selama tahun 1994 meningkat 12,55 persen (5 100 ton). Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB DKI Jakarta 0,06 persen atau dua kali lipat dibandingkan dengan Sub Sektor Peternakan. Sebagian besar produksi ikan melalui pelelangan ikan Muara Baru (92,14 persen), sedangkan lainnya melalui pelelangan ikan Muara

Kamal, Muara Angke dan Pasar Ikan. Dari jumlah tersebut diatas 81,61 persen merupakan hasil ikan lokal dan dari luar daerah, sedangkan sisanya adalah ikan darat. Jenis ikan yang terbanyak dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah ikan Tongkol (12,87 persen), Tenggiri (4,15 persen), Selar (5,29 persen), Tembang (5,09 persen) dan jenis lainnya masing-masing kurang dari 2 000 ton per tahun.

Volume ekspor ikan selama tahun 1994 adalah 31 802 ton dan 56,41 persen merupakan olahan beku, 25,68 persen produksi ikan segar, sedang sisanya merupakan produksi beku dan olahan kering. Secara keseluruhan nilai ekspor produksi ikan 282 077 ribu US \$. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 1993 terjadi kenaikan sebesar 21,53 persen. Jenis ikan yang terbanyak diekspor adalah udang (45,93 persen), ikan tuna (34,34 persen), diikuti oleh rajungan, lobster dan jenis ikan lainnya. Berdasarkan negara tujuan ekspor, maka negara tujuan utama adalah Jepang (74,31 persen), USA (12,77 persen), Singapura (6,32 persen), sisanya kenegara-negara Belgia, Perancis, Hongkong, Arab Saudi dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikan yang terbanyak diekspor adalah Udang dan Tuna dengan negara tujuan utama adalah Jepang, USA dan Singapura.

BAB V
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I memegang peranan strategis dalam upaya meletakkan landasan pembangunan yang kokoh bagi tahap pembangunan jangka panjang selanjutnya. Dalam PJP I pembangunan industri harus mampu membawa perubahan mendasar dalam struktur perekonomian Indonesia. Pertumbuhan sektor industri harus mampu menjadi penggerak bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan struktur ekonomi yang semakin seimbang antara sektor industri dengan sektor lainnya. Pembangunan sektor industri dilaksanakan secara bertahap dan terpadu melalui tahapan Repelita. Tahapan Repelita I meletakkan dasar yang kuat bagi tahapan Repelita II, dan tahapan repelita III merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya dan seterusnya. Sejak Repelita IV mulai dirintis, pengembangan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri dan diteruskan pada Repelita selanjutnya.

GBHN 1988 menggariskan bahwa proses industrialisasi harus mampu mendukung perluasan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa, peningkatan ekspor dan penghematan devisa. Dalam proses pengembangan sektor industri diusahakan agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi semakin kokoh dan mempererat keterkaitan antara sektor industri dan sektor lainnya. Dengan dikembangkannya sektor industri secara menyeluruh diharapkan akan merangsang sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan dan menunjang sektor industri. Demikian pula diusahakan agar pengembangan industri besar dan sedang dapat

berkembang sejalan dan serasi dengan industri kecil dan kerajinan rumahtangga sehingga dapat memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja.

5.1. Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian DKI Jakarta.

Mengawali PJP II pertumbuhan sektor industri tahun 1994 mencapai 10,8 persen dengan kontribusi 21,96 persen dalam pertumbuhan PDRB DKI Jakarta. Kontribusi industri pengolahan tahun 1994 menempati urutan ke 3 setelah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 22,96 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 21,99 persen. Sumbangan sektor industri pengolahan selama tahun 1994 atas dasar harga konstan 1993 mencapai 12 145 471 juta rupiah, sedangkan atas dasar harga berlaku 12 858 055 juta rupiah.

Sektor industri pengolahan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) diklasifikasikan atas sub sektor sebagai berikut:

- Kode 3.1 Industri makanan, minuman dan tembakau.
- Kode 3.2 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
- Kode 3.3 Industri kayu dan sejenisnya termasuk peralatan rumahtangga.
- Kode 3.4 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.
- Kode 3.5 Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, karet dan barang-barang dari plastik.
- Kode 3.6 Industri barang-barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara.
- Kode 3.7 Industri logam dasar.

Kode 3.8 Industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya.

Kode 3.9 Industri pengolahan lainnya.

Kontribusi sektor industri pengolahan jika ditinjau menurut sub sektor atas dasar harga konstan 1993, maka sub sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki menduduki peringkat tertinggi (5,81 persen), diikuti oleh sub sektor alat angkutan, mesin dan peralatannya (5,09 persen), sub sektor makanan, minuman dan tembakau (4,39 persen), sub sektor pupuk, kimia dan barang dari karet (3,63 persen) dan sub sektor lainnya masing-masing kurang dari 2 persen.

Ditinjau dari laju pertumbuhannya selama tahun 1994, sub sektor makanan, minuman dan tembakau menduduki peringkat tertinggi yakni 23,42 persen dibandingkan dengan tahun 1993. Peringkat kedua sub sektor alat angkutan, mesin dan peralatannya (19,83 persen), diikuti oleh sub sektor semen dan barang galian bukan logam (15,33 persen), sedangkan sub sektor lainnya masing-masing kurang dari 10 persen. Sub sektor logam dasar, besi dan baja menunjukkan penurunan 3,75 persen.

Sektor industri pengolahan dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan yang didasarkan pada banyaknya pekerja yaitu:

- a. Industri besar, jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- b. Industri sedang, jumlah tenaga kerja 20 - 99 orang.
- c. Industri kecil, jumlah tenaga kerja 5 - 19 orang.
- d. Industri kerajinan rumahtangga, jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang.

Selanjutnya bahasan tentang industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumahtangga adalah dalam kondisi tahun 1993.

5.2. Industri Besar dan Sedang

Banyaknya perusahaan industri besar dan sedang relatif lebih kecil dibandingkan dengan industri kecil dan rumahtangga, namun demikian perusahaan industri besar dan sedang lebih banyak menghasilkan nilai output dan nilai tambah serta lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan industri kecil dan rumahtangga.

Banyaknya perusahaan industri besar dan sedang tahun 1993 mencapai 2 284 perusahaan. Dibandingkan tahun 1990 mengalami penurunan 9,92 persen. Tahun 1993 industri besar dan sedang mampu menyerap 416 672 tenaga kerja. Hal ini merupakan suatu peningkatan 14,11 persen bila dibandingkan dengan tahun 1990 (365 158 tenaga kerja). Nilai output yang dihasilkan mencapai sekitar 23 741 milyar rupiah, terjadi kenaikan 34,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Output tersebut didominasi oleh sub sektor industri barang dari logam (37,75 persen), kemudian diikuti oleh sub sektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (18,85 persen), industri kimia dan barang-barang dari kimia (15,44 persen), industri makanan, minuman dan tembakau (11,47 persen) dan 5 sub sektor lainnya dengan persentase keseluruhan 16,49 persen. Tabel 5.3.

Bila ditinjau dari input yang dibutuhkan tahun 1993 mencapai sekitar 13 661 milyar rupiah. Input tersebut juga didominasi oleh sub sektor industri, barang-barang dari logam (35,13 persen), industri kimia dan barang-barang dari kimia (17,69 persen), industri makanan/minuman dan tembakau 14,91 persen, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit 14,03 persen dan 5 sub sektor lainnya dengan persentase keseluruhan 18,24 persen. Tabel 5.4.

Nilai tambah yang dihasilkan tahun 1993 mencapai sekitar 10 080 milyar rupiah. Seperti halnya input dan output maka sub sektor industri barang-barang dari logam mendominasi nilai tambah dengan kontribusi 41,3 persen, diikuti industri tekstil, pakaian jadi dan kulit 25,39 persen, industri kimia dan barang-barang dari kimia 12,40 persen; industri makanan, minuman dan tembakau 6,82 persen dan kontribusi 5 sub sektor lainnya 14,09 persen.

Tabel 5.5.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi sub sektor industri barang-barang dari logam mendominasi sektor industri pengolahan dalam hal output (37,75 persen), input 35,13 persen maupun nilai tambah 41,30 persen. Sedangkan industri tekstil, pakaian jadi dan kulit menempati urutan pertama dalam hal jumlah perusahaan yaitu 39,32 persen dan penyerapan tenaga kerja 39,01 persen serta menempati urutan kedua peringkatnya dalam output (18,85 persen) dan nilai tambah (25,39 persen). Industri kimia dan barang-barang dari kimia menempati peringkat ketiga dalam banyaknya perusahaan yaitu 15,80 persen, penyerapan tenaga kerja (14,55 persen) , kontribusi terhadap output 15,14 persen dan nilai tambah 12,40 persen , serta menempati peringkat kedua kontribusinya dalam input (17,69 persen).

5.3. Industri Kecil dan Rumah tangga

Dalam pengembangan sektor industri secara menyeluruh diupayakan agar pengembangan industri besar dan sedang dapat tumbuh dan berkembang sejalan dan serasi dengan industri kecil dan rumah tangga. Dengan berkembangnya industri kecil dan

rumahtangga selain memperluas lapangan usaha juga dapat memperluas kesempatan kerja serta membantu meningkatkan ekspor. Seperti halnya industri besar dan sedang, maka industri kecil dan rumahtangga diklasifikasikan atas 9 klasifikasi berdasarkan jenis barang yang dihasilkan. Industri kecil dan rumahtangga di DKI Jakarta tidak terdapat jenis industri dasar logam. Banyaknya perusahaan industri kecil di DKI Jakarta tahun 1993 sebanyak 6 448 perusahaan. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit mendominasi industri besar dan sedang yaitu 57,26 persen. Urutan kedua adalah industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 18,55 persen, kemudian diikuti industri kayu dan barang-barang dari kayu sebesar 14,11 persen dan perusahaan industri lainnya secara keseluruhan 10,08 persen. Tenaga kerja yang terserap tahun 1993 baik tenaga kerja dibayar maupun tidak dibayar mencapai 54 119 tenaga kerja. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja (61,23 persen) , diikuti oleh industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 15,28 persen, kemudian industri kayu dan barang-barang dari kayu sebesar 13,43 persen dan industri lainnya 10,06 persen. (Tabel. 5.6.)

Rata-rata pendapatan untuk tenaga kerja berupa gaji, tunjangan, hadiah/lembur dan bonus 1 108,3 ribu rupiah per tahun. Pendapatan tenaga kerja industri barang-barang dari logam sebesar 1 670,1 ribu rupiah merupakan angka tertinggi, kemudian diikuti industri kayu dan barang dari kayu sebesar 1 570,2 ribu rupiah. Rata-rata pendapatan per tahun terendah dari industri makanan, minuman dan tembakau. Bila ditinjau menurut banyaknya tenaga kerja, maka sebagian besar industri kecil (73,17 persen) dengan

tenaga kerja 5-9 orang. Persentase banyaknya perusahaan dengan tenaga kerja 10-14 orang dan 15-19 orang masing-masing 19,36 persen dan 7,47 persen. (Tabel 5.7.). Besarnya output, input dan nilai tambah industri kecil tahun 1993 masing-masing mencapai sekitar 435 milyar rupiah, 265 milyar rupiah dan 170 milyar rupiah. Output, input dan nilai tambah tersebut didominasi oleh industri kecil, pakaian jadi dan kulit, masing-masing sekitar 62 persen, 63 persen dan 61 persen.

Output terbesar kedua dan ketiga didominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau 13,23 persen, industri kayu dan barang-barang dari kayu 11,66 persen. Demikian juga input dominan kedua dan ketiga dari industri yang sama, masing-masing sekitar 16 persen dan 9 persen. Sedangkan nilai tambah kedua dan ketiga didominasi oleh industri kayu dan barang-barang dari kayu serta industri makanan, minuman dan tembakau masing-masing sekitar 15 persen dan 9 persen. (Tabel. 5.8 .)

**TABEL 5.1. BANYAKNYA PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG,
1990 - 1993**

KLASIFIKASI INDUSTRI / kode	1990	1991	1992	1993
1. MAKANAN, MINUMAN DAN TEBBAKAU (31)	253	205	203	207
2. TEKSTIL , PAKAIAN JADI DAN KULIT (32)	1 099	913	956	898
3. KAYU DAN BARANG DARI KAYU (33)	177	133	141	138
4. KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS (34)	218	175	182	188
5. KIMIA DAN BARANG DARI KIMIA (35)	434	347	360	361
6. BARANG GALIAN BUKAN LOGAM (36)	47	36	35	38
7. INDUSTRI LOGAM DASAR (37)	27	33	34	32
8. BARANG DARI LOGAM (38)	410	345	371	366
9. INDUSTRI LAINNYA (39)	39	44	51	56
JUMLAH	2 704	2 231	2 333	2 284

**TABEL 5.2. BANYAKNYA TENAGA KERJA INDUSTRI BESAR DAN SEDANG,
1990 - 1993**

KLASIFIKASI INDUSTRI/kode	1990	1991	1992	1993
1. MAKANAN, MINUMAN DAN TEBAKAU (31)	22 466	22 800	23 936	25 489
2. TEKSTIL , PAKAIAN JADI DAN KULIT (32)	139 436	143 042	158 572	164 627
3. KAYU DAN BARANG DARI KAYU (33)	16 485	13 960	15 043	20 623
4. KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS (34)	21 734	20 410	21 865	23 221
5. KIMIA DAN BARANG DARI KIMIA (35)	59 851	55 433	56 026	60 622
6. BARANG GALIAN BUKAN LOGAM (36)	13 321	14 525	14 637	14 967
7. INDUSTRI LOGAM DASAR (37)	5 449	7 180	7 646	7 977
8. BARANG DARI LOGAM (38)	79 025	87 274	81 336	88 111
9. INDUSTRI LAINNYA (39)	7 391	8 598	8 916	11 035
JUMLAH	365 158	371 222	387 977	416 672

**TABEL 5.3. NILAI OUTPUT INDUSTRI BESAR DAN SEDANG,
1990 - 1993 (Juta Rupiah)**

KODE INDUSTRI	1990	1991	1992	1993
31	1 406 116,7	1 633 458,8	2 283 972,9	2 724 005,9
32	1 734 691,8	1 962 280,2	2 679 394,0	4 475 886,1
33	209 466,4	221 903,3	368 755,5	354 813,7
34	591 496,0	660 144,5	795 333,5	1 123 163,8
35	2 257 646,8	3 186 709,1	2 987 693,4	3 665 916,1
36	435 411,0	648 983,6	644 614,0	742 887,4
37	732 131,5	1 357 584,0	1 043 826,5	1 405 939,0
38	6 187 033,2	8 262 694,0	6 681 749,2	8 962 472,4
39	157 015,4	104 145,5	140 625,6	286 169,4
JUMLAH	13 711 009,0	18 037 903,1	17 625 464,7	23 741 253,8

**TABEL 5.4. BIAYA INPUT INDUSTRI BESAR DAN SEDANG,
1990 - 1993 (Juta Rupiah)**

KODE INDUSTRI	1990	1991	1992	1993
31	1 008 625,6	1 186 866,4	1 578 320,7	2 036 859,8
32	1 100 088,5	1 233 683,4	1 534 389,9	1 916 208,1
33	127 762,9	131 586,4	172 820,7	211 702,1
34	376 890,0	399 522,0	365 103,9	517 447,3
35	1 486 034,0	1 679 479,8	2 133 472,2	2 416 262,2
36	317 289,6	382 262,2	356 158,6	448 266,7
37	569 622,5	922 364,4	825 828,2	1 127 754,8
38	4 145 921,1	5 329 448,2	4 010 481,0	4 799 581,9
39	112 293,9	62 260,5	88 919,7	186 671,9
JUMLAH	9 244 528,2	11 327 473,5	11 065 505,4	13 660 754,8

**TABEL 5.5. NILAI TAMBAH BRUTO INDUSTRI BESAR DAN SEDANG,
1990 - 1993 (Juta Rupiah)**

KODE INDUSTRI	1990	1991	1992	1993
31	397 491,1	1 625 525,9	705 642,2	687 146,1
32	634 603,3	1 898 559,0	1 145 004,1	2 559 678,1
33	81 703,4	214 600,9	195 934,7	143 111,6
34	214 606,0	632 900,4	430 229,5	605 716,5
35	771 612,8	3 070 602,6	854 221,2	1 249 653,9
36	118 121,5	647 651,5	288 455,3	294 620,7
37	162 509,0	1 357 204,4	217 998,3	278 184,2
38	2 041 112,0	7 283 023,5	2 671 267,9	4 162 890,4
39	44 721,5	104 034,3	51 705,9	99 497,6
JUMLAH	4 466 480,8	16 834 102,5	6 560 459,0	10 080 499,1

**TABEL 5.6. BANYAKNYA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, TENAGA KERJA
DAN PENGELUARAN UNTUK TENAGA KERJA, TAHUN 1993
(Juta Rupiah)**

KODE INDUSTRI	Perusahaan	Tenaga Kerja	Pengeluaran untuk tenaga kerja (000 Rp)	Rata-rata Pengeluaran untuk tenaga kerja(000Rp)
31	1 196	8 268	3 894 202	471,0
32	3 692	33 137	38 755 080	1 169,5
33	910	7 267	11 410 360	1 570,2
34	247	1 989	2 041 598	1 026,4
35	117	1 235	1 485 237	1 202,6
36	39	234	223 587	955,5
37	-	-	-	-
38	104	754	1 259 245	1 670,1
39	143	1 235	909 493	736,4
JUMLAH	6 448	54 119	59 978 802	1 108,3

TABEL 5.7. PERSENTASE PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL MENURUT BANYAKNYA TENAGA KERJA, TAHUN 1993 (Persen)

KODE INDUSTRI	BANYAKNYA TENAGA KERJA			JUMLAH
	5 - 9	10 - 14	15 - 19	
31	86,96	10,87	2,17	100,00
32	64,44	26,05	9,51	100,00
33	84,27	8,58	7,15	100,00
34	84,21	10,52	5,27	100,00
35	66,67	11,11	22,22	100,00
36	100,00	-	-	100,00
37	-	-	-	100,00
38	100,00	-	-	100,00
39	72,72	27,28	-	100,00
RATA-RATA	73,17	19,36	7,47	100,00

TABEL 5.8. NILAI OUTPUT, INPUT DAN NILAI TAMBAH INDUSTRI KECIL TAHUN 1993 (Juta Rupiah)

KODE INDUSTRI	OUTPUT	INPUT	NILAI TAMBAH BRUTO
31	57 560,04	41 822,04	15 738,00
32	271 464,37	166 966,88	104 497,49
33	50 715,33	24 985,45	25 729,88
34	9 849,47	6 341,34	3 508,13
35	18 981,74	14 324,36	4 657,38
36	536,51	223,79	312,72
37	-	-	-
38	21 936,62	8 094,96	13 841,66
39	3 903,64	2 167,98	1 735,66
JUMLAH	434 947,72	264 926,80	170 020,92

BAB VI LISTRIK , GAS DAN AIR BERSIH

Dalam GBHN 1988 pembangunan sektor pertambangan dan energi diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya kekayaan tambang bagi pembangunan nasional dan dilakukan secara terpadu dengan pengembangan energi, pembangunan daerah serta pembangunan di berbagai sektor lainnya . Pemanfaatan kekayaan tambang dan energi diupayakan untuk peningkatan kebutuhan dalam negeri , peluang ekspor dan kelestarian sumber energi untuk jangka panjang . Pembangunan pertambangan dan energi yang bertepatan akan dapat memacu pertumbuhan pembangunan sektor lainnya dengan mendasarkan pada penyediaan bahan baku bagi industri nasional, meningkatkan ekspor dan penerimaan nasional serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja .

Penerimaan sektor Pertambangan dan Energi di DKI Jakarta hanya diwakili oleh Listrik, Gas dan Air Bersih karena tidak terdapat sumber pertambangan . PEMDA DKI Jakarta dalam mengupayakan pembangunan listrik, gas dan air bersih untuk memenuhi kebutuhan regional maupun sebagai sumber penerimaan dan devisa regional .

Selama tahun 1994 sub sektor Listrik , Gas dan Air Bersih telah memberikan andil 1,66 persen terhadap PDRB DKI Jakarta . Angka tersebut didominasi oleh Listrik dengan kontribusi terhadap PDRB 1,32 persen , kemudian diikuti oleh Gas dan Air Bersih . Laju pertumbuhan listrik 5,70 persen , gas 27,24 persen dan air bersih 1,06 persen . Sehingga secara keseluruhan telah membentuk laju pertumbuhan Listrik , Gas dan Air Bersih 7,15 persen .

Kebutuhan akan listrik, gas dan air bersih setiap tahun senantiasa meningkat. Namun peningkatan kebutuhan ini diimbangi pula dengan peningkatan produksi . Sejak tahun 1990 hingga tahun 1994 produksi meningkat dari 9 405 509 MWH menjadi 13 570 102 MWH , atau terjadi peningkatan produksi rata-rata per tahun 11,07 persen .

Banyaknya listrik terjual tahun 1990 hingga tahun 1994 meningkat dari 7 700 739 MWH menjadi 11 907 042 MWh , atau penjualan meningkat rata-rata per tahun 13,66 persen . Berdasarkan uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa peningkatan produksi listrik kurang dapat mengimbangi dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan akan listrik, disamping itu masih terdapat penyusutan energi pada tahun 1994 sebesar 12,26 persen (Tabel 6.1. dan 6.2)

Peningkatan kebutuhan gas kota sejak tahun 1990 hingga 1994 rata-rata per tahun 42,76 persen , sedangkan peningkatan produksi 42,23 persen . Jadi seperti halnya listrik , maka persentase peningkatan produksi lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan .

Produksi air bersih setiap tahun meningkat rata-rata 7,94 persen , dan pada tahun 1994 produksi mencapai 28 151 548 ribu M3, sedangkan yang terjual 13 293 291 M3 . Jadi terdapat penyusutan dan cadangan air pada tahun 1994 mencapai 52,78 persen

Banyaknya air produksi Sumur Dalam pada tahun 1990 hingga 1994 meningkat dari 28 461 600 ribu M3 hingga 35 471 258 ribu M3, atau terjadi peningkatan produksi rata-rata per tahun 6,16 persen, sedangkan perkembangan jumlah air yang terjual tidak menunjukkan kenaikan yang berarti . Bila ditinjau dari banyaknya

produksi PAM dan Sumur Dalam tahun 1994 (63 622 806 ribu M3) dibandingkan dengan banyaknya yang terjual (43 142 141 ribu M3) maka terjadi penyusutan dan cadangan air 20 480 665 ribu M3 atau terdapat penyusutan dan cadangan 32,19 persen .

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa persentase peningkatan kebutuhan listrik, gas kota dan air bersih setiap tahun lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan produksi . Namun demikian jumlah produksi masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penjualan atau kebutuhan akan listrik , dan air . (Tabel 6.4.)

**TABEL 6.1. PRODUKSI LISTRIK *, GAS dan AIR BERSIH ,
1990 - 1994**

Uraian	Satuan	1990	1991	1992	1993	1994
1. Listrik	Ribu KWH	9.405.509	10.467.161	10.921.463	12.116.557	13.570.102
2. Gas Kota	Ribu M3	236.728	351.751	417.063	475.160	636.626
3. Air Minum	Ribu M3	21.366.070	27.299.654	28.563.160	28.593.235	28.151.548
4. Sumur Dalam	Ribu M3	28.461.600	29.523.701	30.403.379	32.673.729	35.471.258

Sumber : DDA 1995

Keterangan : */ Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang .

**TABEL 6.2. PRODUKSI LISTRIK *, GAS dan AIR BERSIH TERJUAL
1990 - 1994**

Uraian	Satuan	1990	1991	1992	1993	1994
1. Listrik	Ribu KWH	7.700.739	8.823.187	9.622.663	10.676.855	11.907.042
2. Gas Kota	Ribu M3	226.346	344.785	412.246	501.332	613.495
3. Air Minum	Ribu M3	11.105.077	919.213	12.846.082	841.848	13.293.291
4. Sumur Dalam	Ribu M3	28.461.600	29.523.701	30.403.379	32.475.249	29.848.850

Sumber : DDA 1995

Keterangan : * Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang

**Tabel 6.3. Banyaknya Pelanggan , Produksi dan
Listrik Terjual , 1990 - 1994**

Tahun	Pelanggan	Produksi (000 KWH)	Terjual (000 KWh)
1990	1 490 503	9 405 509	7 700 739
1991	1 566 027	10 467 162	8 823 187
1992	1 665 387	10 921 463	9 622 663
1993	1 798 734	12 116 557	10 676 855
1994	1 963 358	13 570 102	11 907 042

Sumber : Jakarta Dalam Angka 1995

Tabel 6.4. Banyaknya Pelanggan Sumur Dalam, Produksi dan Air Terjual , 1990 - 1994

Tahun	Pelanggan	Produksi (000 M 3)	Terjual (000 M 3)
1990	2 640	28 461 600	28 461 600
1991	2 668	29 523 701	29 523 701
1992	2 681	30 403 379	30 403 379
1993	2 848	32 673 729	32 475 249
1994	2 946	35 471 258	29 848 850

Sumber : Jakarta Dalam Angka 1995

BAB VII SEKTOR TERSIER

7.1 Peranan Sektor Tersier Dalam Perekonomian DKI Jakarta

Secara teoritis, dalam teori ekonomi makro, pola pergeseran perekonomian suatu wilayah, adalah pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan selanjutnya dari sektor sekunder ke sektor tersier. Pergeseran ini memperlihatkan dinamika perilaku ekonomi dalam suatu kecenderungan arah perkembangannya dimasa datang. Artinya terjadi perubahan atau pergeseran peranan sektor ekonomi dari aktivitas ekonomi yang semula sangat memanfaatkan sumber daya alam kepada bentuk aktivitas ekonomi yang lebih memanfaatkan kemampuan sumber daya manusianya. Seperti diketahui, kemampuan sumber daya manusia akan selalu mungkin ditingkatkan dibanding sumber daya alam yang suatu ketika bisa habis.

Perekonomian DKI sendiri, dewasa ini telah di dominasi sektor tersier atau sektor pelayanannya. Hal ini nampaknya telah sejalan dengan rencana jangka panjang pembangunan DKI Jakarta, yaitu menjadikan DKI Jakarta sebagai kota pelayanan (*Services City*).

Peranan sektor tersier ini, pada tahun 1994 telah mencapai 60 persen lebih, dimana sektor perdagangan, perhotelan dan restoran/ rumahmakan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sangat dominan peranannya. Kedua sektor ini, telah menyumbang 45 persen lebih dalam sektor tersiernya (lihat Tabel 7.1).

Sektor industri sendiri dalam jangka panjang, nampaknya akan di relokasikan di wilayah-wilayah pendukung (*hinterland*) DKI seperti di wilayah Botabek, kecuali untuk jenis-jenis *clean industry*. Dengan keadaan perindustrian semacam itu, maka persoalan lingkungan yang bersih dan manusiawi di DKI, bukan lagi sebuah persoalan yang amat rumit untuk diwujudkan, karena salah satu sumber limbah yang dominan, yaitu limbah industri akan bisa diatasi.

Namun demikian, melihat perkembangan sumbangan (*share*) sektor tersier ini dalam pembentukan PDRB dalam harga berlaku antara tahun 1993 - 1994, peranan sektor tersier ini mengalami sedikit penurunan, yaitu pada tiga dari empat sektor tersier tersebut telah mengalami penurunan peranan. Pada sektor Perdagangan, hotel dan restoran menurun dari 22,19 persen pada tahun 1993 menjadi 22,13 persen pada tahun 1994. Sektor pengangkutan dan komunikasi juga demikian, dari 8,89 persen menjadi 8,23 persen. Sedangkan sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan justru sedikit meningkat dari 22,38 persen menjadi 23,28 persen, sementara sektor jasa-jasa mengalami penurunan dari 10,01 menjadi 9,65 persen.

Pada harga konstannyaupun, perkembangannya berbanding lurus searah dengan perkembangan sumbangan pada harga berlaku. Sektor tersier sendiri secara total, sumbangannya menurun dari 63,47 pada tahun 1993 menjadi 63,29 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 1994. Pada harga konstan, dari sebesar 63,47 persen menjadi 63,27 persen. Satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan hanya sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dimana sub sektor perbankan adalah yang paling dominan.

Prediksi pesimistis, seandainya perkembangan tersebut berlanjut dengan arah yang sama, maka dalam jangka panjang pergeseran ekonomi akan kembali ke sektor sekunder dan primer. Keadaan ini tentunya merupakan *setback* yang amat sangat tidak diharapkan. Meskipun demikian, secara logika nampaknya keadaan diatas diperkirakan hanya merupakan gerak fluktuatif ekonomi akibat munculnya beberapa perangkat kebijaksanaan ekonomi oleh pemerintah yang bersifat sementara pengaruhnya.

Gejala temporer diatas, mungkin lebih kentara apabila memperhatikan perkembangan nilai absolut dan riil dari sektor-sektor tersier tersebut. Perkembangan antara tahun 1993-1994 dari sebagian besar sektor tersier ini cukup tinggi. Pada harga berlaku cukup bervariasi, antara 7,53 persen sampai 29,36 persen. Sedangkan pada harga konstan, kendati masih beragam namun tidak setajam harga berlakunya, yaitu antara 5,27 sampai 13,16 persen.

Secara umum cakupan data pada sektor tersier ini, kelihatannya masih "*under estimate*", karena sebagaimana diketahui pada sektor ini ada bagian sektor informal yang sebagian besar belum terpantau keberadaannya. Hal ini erat kaitannya dengan metodologi penelitian yang digunakan yang belum memungkinkan menjangring sektor ini secara paripurna.

**TABEL 7.1. SUMBANGAN SEKTOR TERSIER TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO , 1993 - 1994 (Persen)**

SEKTOR/ SUB SEKTOR	Harga Berlaku			Harga Konstan 1993		
	1993	1994	Pertum- buan	1993	1994	Pertum- buan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,19	22,13	16,94	22,19	21,99	7,45
1.1. Perdagangan Besar dan Eceran	17,45	17,25	15,89	17,45	17,31	7,58
1.2. Hotel	0,75	0,82	29,36	0,75	0,76	9,75
1.3. Restoran	3,99	4,06	19,20	3,99	3,92	6,43
2. Pengangkutan dan Komunikasi	8,89	8,23	8,53	8,89	8,66	5,53
2.1. Pengangkutan	6,26	5,74	7,53	6,26	6,10	5,65
2.2. Komunikasi	2,64	2,49	10,90	2,64	2,56	5,27
3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	22,38	23,28	21,93	22,38	22,96	11,24
3.1. Bank	12,18	12,81	23,32	12,18	12,65	12,64
3.2. Lembaga Keuangan Lainnya	2,50	2,53	18,63	2,50	2,58	12,28
3.3. Sewa Bangunan	4,67	4,72	18,57	4,67	4,55	5,76
3.4. Jasa Perusahaan	3,04	3,22	24,17	3,04	3,17	13,16
4. Jasa-Jasa	10,01	9,65	13,00	10,01	9,66	4,61
JUMLAH	63,47	63,29	16,90	63,47	63,27	8,07

Sumber : K.S. Prop. DKI Jakarta

7.2 Sub sektor Perdagangan dan Sub Sektor Pengangkutan

Sub sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran, yakni sebesar 17 persen lebih, baik pada harga konstan maupun berlaku. Apabila menelaah teori arus barang dalam kegiatan perdagangan (*commodity flow*), maka besaran nilai tambah yang tercipta di sub sektor perdagangan, secara matematis sangat dipengaruhi output dari sektor primer dan sekunder domestiknya. Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta tidak mempunyai potensi pada sektor primernya, namun pada sektor sekunder potensinya tidak perlu diragukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor baik dalam maupun luar negeri. Apalagi DKI Jakarta, mempunyai fasilitas distribusi dan juga pemasaran yang kenyataannya banyak dimanfaatkan oleh propinsi lain. Khususnya fasilitas ekspor dan impor, sehingga meskipun menurut teori arus barang, sektor primernya tidak memiliki potensi menghasilkan nilai tambah beranting ke sektor perdagangan, namun aktivitas perdagangan yang diciptakan untuk melayani hasil sektor sekundernya dan jualan jasa perdagangan untuk wilayah lain, sangat tidak bisa diremehkan. Disamping itu, dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 9 juta orang, DKI Jakarta merupakan daerah potensial pemasaran. Kondisi ini nampaknya dalam jangka panjangpun masih akan bertahan, karena kendati berbagai aturan diterapkan untuk menahan laju kaum migran dari luar, namun kenyataannya jumlah arus pendatang dari tahun ketahun selalu meningkat. Akibatnya, pertumbuhan penduduk DKI masih diatas 2 (dua) persen dan seperlima diantara pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan warga pendatang.

Sub sektor perhotelan di DKI Jakarta, selama ini peranannya dalam pembentukan PDRB belumlah berarti, hanya kurang dari satu persen saja baik pada tahun 1993 maupun 1994. Namun demikian dengan semakin berkembangnya jaringan aktivitas ekonomi antar negara dan daerah, maka diperkirakan sub sektor ini akan memperoleh dampak ekonomisnya.

Rata-rata tamu asing yang menginap di hotel berbintang pada tahun 1994 adalah 66.811 orang perbulan, sedangkan tamu domestik lebih tinggi yaitu 80.185 orang perbulan. Sementara di hotel melati, rata-rata jumlah tamu asing yang menginap perbulan adalah 4.140 orang dan 106.075 orang tamu domestik. Rendahnya rasio tamu asing terhadap domestik yang menginap di hotel di DKI Jakarta, memperlihatkan kebenaran anggapan bahwa jalur penerbangan langsung dari dan ke luar negeri yang diberikan kepada beberapa pelabuhan udara di Indonesia seperti Bali, membawa dampak rendahnya tamu asing yang singgah di DKI Jakarta. Sehingga devisa pun tak cukup banyak terjaring di DKI Jakarta. Lebih jelasnya perhatikan Tabel 7.2.

**TABEL 7.2. BANYAKNYA TAMU ASING DAN DOMESTIK
HOTEL BERBINTANG DAN MELATI, 1994**

B U L A N	Hotel Berbintang		Hotel Melati	
	Asing	Dalam Negeri	Asing	Dalam Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Januari	64 520	83 896	5 378	133 633
2. Pebruari	65 178	69 052	4 038	96 389
3. Maret	65 659	73 493	4 638	98 074
4. April	65 709	75 250	2 015	100 292
5. Mei	85 479	85 539	3 042	122 629
6. Juni	66 641	79 152	151	112 062
7. Juli	65 721	83 167	6 685	112 756
8. Agustus	74 486	77 033	6 044	99 952
9. September	69 345	73 101	2 905	105 260
10. Oktober	58 904	82 328	4 016	116 064
11. Nopember	67 144	87 317	7 082	86 707
12. Desember	52 950	92 886	3 685	99 877
Rata-Rata	66 811	80 185	4 140	106 975

Berkaitan dengan kegiatan distribusi diatas, maka terkait erat dengannya adalah sub sektor angkutan. Logikanya sub sektor ini akan berkembang dan tumbuh selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan distribusinya. Sayangnya data yang tersedia untuk tahun dasar yang baru (1993 - 100) hanya ada dua tahun, maka agak sulit untuk menganalisis kecenderungannya.

Sub sektor angkutan sendiri, memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat. Angkutan kereta api (lihat Tabel 7.3), pada tahun 1990 total penumpang yang naik kereta api dari wilayah DKI

Jakarta mencapai hampir 32,5 juta penumpang, atau hampir 4 kali penduduk DKI Jakarta saat itu. Artinya, mobilitas penduduk dengan menggunakan Kereta Api amat tinggi. Diperkirakan setiap harinya ada sekitar 90.000 orang. Jumlah penumpang terus berkembang sehingga pada tahun 1994 mencapai 80.847.884 orang, selama 4 tahun ini telah terjadi pertumbuhan sebesar satu setengah kali dan nampaknya data inipun masih jauh dari kenyataan lapangan. Namun demikian, kecenderungan diatas memperlihatkan kenyataan bahwa perkembangan permintaan akan sarana transportasi meningkat dengan sangat pesat. Apabila diteliti lebih jauh, ternyata mobilitas penumpang kereta api tersebut, pada tahun 1990 hampir mencapai 80 persen diantaranya adalah penumpang yang melakukan aktivitas perjalanan dalam wilayah domestik DKI Jakarta saja dan sisanya yang melakukan perjalanan keluar DKI Jakarta. Tahun 1994, keadaan ini tidak terlalu banyak berubah, kendati komposisi mobilitas penumpang domestik meningkat sedikit menjadi 81 persen lebih. Angkutan penumpang bermotor sebagaimana tersaji pada Tabel 7.4, memperlihatkan bahwa pada tahun 1990 tercatat ada 2.653 unit dan menjadi 3.737 unit pada tahun 1994. Terjadi peningkatan rata-rata 10 persen pertahun. Sedangkan jumlah penumpang yang diangkut dari 1.726.827 penumpang pada tahun 1990 menjadi 2.522.170 orang, terjadi peningkatan sekitar 11,5 persen setahun. Sama halnya dengan angkutan kereta api, ternyata pertumbuhan penumpang sedikit diatas sarana angkutannya. Ini merupakan petunjuk bahwa permintaan lebih cepat tumbuh dibanding penawaran.

TABEL 7.3. LALU LINTAS ANGKUTAN KERETA API , 1990 - 1994

T A H U N	Penumpang		Jumlah
	Luar Kota	Dalam Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
1990	6 611 225	25 838 015	32 449 240
1991	6 507 074	23 204 571	29 711 645
1992	6 993 270	32 635 483	39 628 753
1993	14 814 889	52 178 989	66 993 878
1994	15 201 978	65 645 906	80 847 884
Rata-Rata	10 025 687	39 900 593	49 926 280

Sumber : JDA 1994

TABEL 7.4. BANYAKNYA KENDARAAN BERMOTOR DAN RATA-RATA PENUMPANG YANG DIANGKUT PER HARI, 1990-1994

T A H U N	Banyaknya Kendaraan Bermotor	Banyaknya Penumpang per Hari
1990	2 653	1 726 827
1991	2 776	1 826 827
1992	2 899	1 850 640
1993	2 983	2 720 540
1994	3 737	2 522 170

Sumber : JDA 1994

Perkembangan frekwensi penerbangan pesawat udara (lihat tabel 7.5), pada tahun 1990 sekitar 149.322 penerbangan yang terdiri atas 20.568 penerbangan luar negeri dan 112.207 penerbangan dalam negeri serta 16.547 penerbangan lokal. Penerbangan ini memuncak pada tahun 1993 yang mencapai 202.606 penerbangan luar dan dalam negeri (tidak termasuk penerbangan lokal sebesar 21.835 penerbangan). Pada tahun tersebut sebagaimana diketahui adalah merupakan tahun kampanye kunjungan ke Indonesia dan Asean, sehingga diperkirakan mampu meningkatkan frekwensi penerbangan di Indonesia dan DKI khususnya. Pada tahun 1994 terjadi penurunan menjadi hanya 176.516 penerbangan luar dan dalam negeri saja. Meskipun demikian, dibanding tahun 1992, frekwensi penerbangan tahun 1994 masih lebih besar.

Banyaknya penumpang pesawat udara pada tahun 1990 untuk penerbangan luar negeri 5.506.719 penumpang, atau rata-rata 268 penumpang per penerbangan. Sedangkan untuk dalam negeri, sekitar 23,64 penumpang per penerbangan. Ratio penumpang per pesawat antara luar dan dalam negeri ternyata cukup jauh berbeda (Tabel 7.6). Pada tahun 1994, rata-rata penumpang per penerbangan luar negeri sekitar 128,3 penumpang dan untuk penerbangan dalam negeri sekitar 58 penumpang per penerbangan. Gambaran diatas memperlihatkan perkembangan yang terbalik pada rata-rata penumpang penerbangan luar negeri yang mengalami penurunan dan sebaliknya pada penerbangan dalam negeri, rata-rata penumpang yang diangkut meningkat. Kebijakan pemerintah untuk membuka penerbangan langsung ke pelabuhan udara internasional dalam negeri diluar DKI Jakarta,

nampaknya telah mengakibatkan penurunan rata-rata jumlah penumpang yang turun dari dan naik ke luar negeri di bandara Sukarno-Hatta.

**TABEL 7.5. BANYAKNYA LALU LINTAS PESAWAT UDARA MELALUI
PELUD SUKARNO-HATTA DAN HALIM PERDANAKUSUMA,
1990 - 1994**

T A H U N	Luar Negeri		Dalam Negeri		Lokal	Jumlah
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang		
1990	10 264	10 304	56 239	55 968	16 547	149 322
1991	11 930	11 947	59 558	59 228	18 265	160 928
1992	15 600	15 450	62 494	62 452	16 830	172 826
1993	24 437	24 261	77 167	76 741	21 835	224 441
1994	19 063	18 989	69 378	69 086	24 366	200 882

Sumber : JDA 1994

**TABEL 7.6. BANYAKNYA PENUMPANG DATANG DAN BERANGKAT MELALUI
PELUD SUKARNO-HATTA DAN HALIM PERDANAKUSUMA,
1990 - 1994**

T A H U N	Luar Negeri		Dalam Negeri		Transit	Jumlah
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1990	2 730 955	2 775 764	1 292 803	1 359 591	431 007	8 590 120
1991	2 842 793	2 887 332	1 401 821	1 511 563	408 498	9 052 007
1992	3 178 265	2 200 197	1 876 913	1 829 814	377 701	9 462 890
1993	3 499 809	3 494 969	2 102 918	2 019 223	335 542	11 452 461
1994	2 457 988	2 424 252	3 970 975	4 057 494	421 585	13 332 294

Sumber : JDA 1994

Berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelayanan diatas, maka DKI Jakarta dengan pelabuhan laut Tanjung Priok nya tak pelak lagi merupakan pintu utama keluar masuk kegiatan ekspor-impor. Berdasarkan data statistik ekspor-impor ternyata neraca ekspor-impor melalui pelabuhan tanjung priok ini masih minus. Tabel 7.7 memperlihatkan bahwa sebagian besar aktivitas distribusi barang di pelabuhan tanjung priok adalah kegiatan impor. Tahun 1990 untuk impor antar pulau ada sebanyak 10.651.406 ton, sedang antar negara sekitar 8.412.680 ton. Sementara untuk ekspor, antar pulau hanya sekitar 3.533.259 ton dan ekspor ke luar negeri 4.704.604 ton. Besarnya impor antar pulau dibanding ekspornya, adalah salah satu dampak dari minimnya produk-produk sektor primer di DKI Jakarta.

TABEL 7.7. KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK , 1990 - 1994.

T A H U N	Antar Pulau		Antar Negara		Jumlah	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1990	10 651 406	3 533 259	8 412 680	4 704 604	19 064 086	8 237 863
1991	3 185 778	1 799 223	8 268 386	4 697 712	11 454 164	6 496 935
1992	3 042 780	2 366 119	10 570 081	5 933 409	13 612 861	8 299 528
1993	10 225 058	2 975 165	12 141 095	6 160 031	22 366 153	9 135 196
1994	10 296 696	2 900 622	14 810 487	5 703 132	25 107 183	8 603 754

Sumber : JDA 1994

7.3 Sub sektor Perbankan

Kegiatan perdagangan dan pengangkutan, biasanya mempunyai hubungan erat dengan sirkulasi aspek finansial atau keuangan. Peranan sub sektor bank ini dalam PDRB, pada tahun 1993 adalah 12,18 persen dan meningkat menjadi 12,65 persen pada tahun 1994 untuk harga konstannya. Sedangkan pertumbuhan riilnya mencapai 12,64 persen. Sirkulasi keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi suatu wilayah juga tinggi dan di DKI Jakarta inipun tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi antara 1993 - 1994 yang mencapai 8 persen lebih, diatas laju pertumbuhan nasional yang masih dibawah 7,5 persen.

Sumbangan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dalam PDRB pada tahun 1993 dalam harga konstan adalah 22,38 persen dan 22,96 persen untuk tahun 1994. Dengan demikian nampak bahwa sub sektor perbankan adalah yang paling dominan, dengan peranannya yang mencapai sekitar 55 persen. Selebihnya terbagi dari sub sektor lembaga keuangan lainnya dan sewa bangunan.

7.4 Sektor Jasa-jasa

Meskipun sumbangan sektor ini terhadap PDRB belum terlalu meyakinkan, yaitu baru antar 12 sampai 13 persen baik pada harga berlaku maupun konstannya, akan tetapi sektor ini diharapkan akan semakin meningkat peranannya dimasa mendatang. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas, akan menyebabkan banyak masyarakat DKI akan mencari jalan dan waktu tersingkat untuk menyelesaikan kebutuhan dan keperluannya. Salah satu

pilihan untuk itu adalah melalui layanan jasa dari sektor ini, baik itu dari sub sektor perorangan, rumahtangga maupun jasa perusahaan.

Disisi lain, aktivitas sektor ini, seringkali merupakan usaha-usaha yang masuk kategori sektor informal. Yang agak sulit dibina agar bisa lebih berkembang dan profesional. Akibatnya perkembangannyapun agak sulit dideteksi dengan mekanisme pemantauan yang konvensional. Perlu perlakuan khusus. Sektor ini oleh seorang pakar, pernah digambarkan sebagai katup pengaman lokomotif ekonomi indonesia bila sedang "kepanasan". Keberadaan mereka sering terabaikan manakala mesin ekonomi sedang normal-normal saja seadaannya. Akan tetapi keberadaannya menjadi terasa penting dalam situasi ekonomi yang sedang tidak normal.

BAB VIII

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Data Perdagangan Luar Negeri pada penyajian ini meliputi data ekspor dan impor melalui pelabuhan muat di DKI Jakarta yang meliputi pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, Pasar Ikan dan pelabuhan udara Sukarno Hatta. Barang-barang ekspor dan impor yang melalui pelabuhan muat di DKI Jakarta sebagian digunakan di wilayah DKI Jakarta, dan sebagian digunakan dan berasal dari luar DKI Jakarta.

8.1. EKSPOR

Perkembangan volume ekspor melalui pelabuhan muat di DKI Jakarta sejak tahun 1989 hingga 1994 meningkat dari 9 790,74 juta ton menjadi 10 309,07 juta ton pertahun atau rata-rata 9 925,17 ton. Perubahan pertahun berfluktuasi dari - 16,02 persen hingga 37,56 persen, atau rata-rata pertahun 1,06 persen.

Nilai ekspor tahun 1989 hingga tahun 1994 berkembang dari 4 614,58 juta US \$ menjadi 12 870,54 US \$, atau rata-rata 8 912,44 US \$ pertahun, dengan perubahan rata-rata mencapai 35,78 persen. Tabel 8.1.

Volume dan nilai ekspor Nasional sejak tahun 1989 hingga 1994 senantiasa meningkat. Peningkatan ini juga diimbangi dengan peningkatan ekspor DKI Jakarta. Dibandingkan dengan ekspor Nasional, peranan volume ekspor DKI Jakarta mencapai rata-rata 6,77 persen pertahun.

Peranan nilai ekspor DKI Jakarta terhadap Nasional juga menunjukkan peningkatan dari 20,82 persen hingga 32,13 persen, atau rata-rata 28,47 persen pertahun. Tabel 8.3.

Bila dibandingkan menurut kelompok barang utama, volume ekspor DKI Jakarta utamanya dari Migas, mencapai 6 351,9 ribu ton (61,61 persen). Sedangkan ekspor Non Migas 3 957,2 ribu ton (38,39 persen). Ekspor hasil industri mendominasi ekspor DKI Jakarta dengan volume 3 697,05 ribu ton dan dengan nilai 11 746,74 juta US \$.

Dari penjelasan tersebut diatas maka kontribusi volume ekspor barang-barang industri mencapai 93,43 persen terhadap ekspor Non Migas atau kontribusi 35,86 persen terhadap ekspor DKI Jakarta termasuk Migas. Sedangkan kontribusi nilai ekspor barang-barang industri mencapai 96,68 persen terhadap nilai ekspor tanpa Migas, atau kontribusi 91,27 persen terhadap ekspor DKI Jakarta termasuk Migas. Ekspor Non Migas DKI Jakarta selain hasil industri adalah hasil Pertanian serta hasil tambang dan lainnya. Tabel 8.4.

Sepuluh jenis barang yang terbanyak di ekspor melalui pelabuhan muat di DKI Jakarta antara lain alas kaki olahraga dan perhiasan selain perak dengan nilai ekspor 774,78 juta US \$ dan 652,96 juta US \$. Kontribusi ekspor tersebut mencapai 6,02 persen dan 5,07 persen terhadap seluruh total nilai ekspor. Tabel 8.5

Ekspor DKI Jakarta sebagian diekspor melalui pelabuhan muat di DKI Jakarta dan sebagian melalui pelabuhan muat diluar DKI Jakarta . Nilai ekspor oleh eksportir DKI Jakarta tahun 1994 mencapai 18 164,97 juta US \$ dengan komposisi 34,06 persen Migas dan 65,94 persen non Migas. seperti halnya ekspor melalui pelabuhan muat, maka dari 65,94 persen ekspor non Migas, 54,79 persen merupakan ekspor hasil industri. Tabel 8.6 dan 8.7.

Ekspor DKI Jakarta tahun 1994 menurut negara tujuan bernilai sekitar 12 870 juta US \$ terutama ke negara-negara Asia mencapai sekitar 6 167 juta US \$ (47,91 persen), Amerika 26,29 persen, Eropa 21,82 persen dan Australia serta Afrika 3,98 persen. Tabel 8.9. Ekspor ke Asean terutama ke Singapore mencapai 1 667,21 juta US \$ (12,95 persen), ekspor ke Jepang 1 160,97 juta US \$ (9,02 persen). Ekspor lainnya terutama ke Amerika Serikat dengan nilai 2 900,60 juta US \$ (22,54 persen) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) bernilai 2 465,51 juta US \$ (19,16 persen). Dibandingkan tahun 1993 ekspor ke Jepang mengalami penurunan 26,50 persen sesudah terjadi kenaikan 4,83 persen pada tahun 1993. Sedangkan ekspor ke MEE meningkat sejak tahun 1992, dengan rata-rata 13,15 persen pertahun. Tabel 8.8

1. Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan nilai ekspor DKI Jakarta sejak 1989 hingga 1994 rata-rata 35,78 persen pertahun. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional rata-rata 16,15 persen pertahun, maka pertumbuhan DKI Jakarta lebih tinggi. Namun pertumbuhan volume ekspor DKI Jakarta dengan rata-rata 1,06 persen pertahun lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yakni 24,07 persen per tahun.
2. Peranan nilai ekspor DKI Jakarta terhadap Nasional sejak tahun 1989 hingga 1994 meningkat dari 20,82 persen menjadi 32,13 persen, atau rata-rata 28,47 persen pertahun. Namun sebaliknya volume ekspor DKI Jakarta sejak tahun 1989 hingga 1994 menunjukkan penurunan rata-rata 10,45 persen per tahun.
3. Berdasarkan pengelompokan barang utama, maka ekspor hasil industri mendominasi barang lainnya. Kontribusi volume

ekspor hasil industri 93,43 persen terhadap hasil ekspor tanpa Migas, sedangkan terhadap ekspor total 35,86 persen. Kontribusi nilai ekspor hasil industri 96,68 persen terhadap ekspor tanpa Migas, sedangkan terhadap ekspor total 91,27 persen.

4. Bila ditinjau menurut negara tujuan, ekspor tahun 1994 sebagian besar ke negara Singapura dan Jepang masing-masing 12,95 persen dan 9,02 persen.
5. Dari beberapa uraian tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa perkembangan volume ekspor cenderung menurun, tetapi nilai ekspor senantiasa meningkat per tahun.

8.2 IMPOR

Impor DKI Jakarta sejak tahun 1992 hingga 1994 terus meningkat. Dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan impor tahun 1993 meningkat 8,99 persen dan tahun 1994 semakin meningkat menjadi 19,57 persen. Impor DKI tahun 1994 Jakarta mencapai 20 198,23 juta US \$. Bila ditinjau menurut negara asal, impor dari negara-negara Asia mencapai 12 070,93 juta US \$ merupakan impor terbesar (59,76 persen) dibandingkan benua lainnya, kemudian diikuti negara-negara MEE sebesar 3 169,23 US \$ (15,69 persen). Jepang mendominasi impor utama barang-barang di DKI Jakarta, yang sejak tahun 1992 hingga 1994 mencapai 4 096,56 juta US \$ (26,40 persen) dan meningkat menjadi 6 229,65 US \$ (30,84 persen). Impor dari negara ASEAN lainnya yang terbanyak dari Singapura mencapai 1 064,06 juta US \$ (5,27 persen). Negara eksportir lainnya setelah Jepang didominasi oleh

Amerika Serikat, yang sejak tahun 1992 sebanyak 1 796,25 juta US \$ turun 10,98 persen pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 meningkat kembali menjadi 1 854,72 juta US \$ atau terjadi kenaikan rata-rata sejak tahun 1992 hingga 1994 sebanyak 1,63 persen pertahun. Tabel 8.9.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nilai impor senantiasa meningkat sejak tahun 1992 hingga 1994 dengan kenaikan rata-rata 15,17 persen pertahun, dan negara importir utamanya dari Jepang disusul Amerika Serikat dan Singapura.

Tabel 8.1 Perkembangan volume dan nilai Ekspor melalui Pel Muat di DKI Jakarta, Tahun 1989 - 1994

T A H U N	VOLUME		NILAI	
	JUTA KG	PERUBAHAN	JUTA US \$	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1989	9 790,74	19,87	4 614,58	35,96
1990	8 222,70	-16,02	5 793,46	25,55
1991	8 721,97	6,07	7 609,66	31,35
1992	11 997,72	37,56	10 638,90	39,81
1993	10 508,80	-12,41	11 947,52	12,30
1994	10 309,07	-1,90	12 870,54	7,73
RATA-RATA	9 925,17	1,06	8 912,44	35,78

Sumber : Statistik Ekspor BPS

Tabel 8.2 Peranan Volume Ekspor melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta terhadap Volume Ekspor Nasional Tahun 1989 - 1994 (Juta Kg)

T A H U N	D K I	NASIONAL	ANDIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1989	9 790,74	102 263,02	9,57
1990	8 222,70	107 566,34	7,64
1991	8 721,97	115 461,29	7,55
1992	11 997,72	151 535,81	7,92
1993	10 508,80	177 470,83	5,92
1994	10 309,07	225 343,81	4,57
RATA-RATA	9 925,17	146 606,85	6,77

Sumber : Statistik Ekspor BPS

Tabel 8.3 Peranan Nilai Ekspor melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta terhadap Nilai Ekspor Nasional Tahun 1989 - 1994 (Juta US \$)

T A H U N	D K I	NASIONAL	ANDIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1989	4 614,58	22 158,86	20,82
1990	5 793,45	25 675,33	22,56
1991	7 609,66	29 142,37	26,11
1992	10 638,89	33 967,00	31,32
1993	11 947,51	36 822,98	32,45
1994	12 870,54	40 053,44	32,13
RATA-RATA	8 912,44	31 303,33	28,47

Sumber : Statistik Ekspor BPS

**Tabel 8.4 Komposisi Ekspor melalui Pelabuhan Muat
di DKI Jakarta menurut Kelompok Barang
Utama/ Sektor, Tahun 1994**

KELOMPOK BARANG UTAMA/SEKTOR	VOLUME (TON)	NILAI (000 US \$)	KOMPOSISI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. M I G A S	6 351 881	720 955	5,60
II. NON MIGAS	3 957 185	12 149 591	94,40
1. PERTANIAN	145 800	384 675	2,99
2. INDUSTRI	3 697 053	11 746 737	91,27
3. PERTAMBANGAN DAN LAINNYA	114 332	18 179	0,14
T O T A L	10 309 066	12 870 546	100,00

Sumber : Statistik Ekspor BPS

Tabel 8.5 Sepuluh Jenis Barang yang terbanyak diekspor melalui Pelabuhan Muat di DKI Jakarta Tahun 1994

JENIS BARANG	VOLUME (TON)	KOMPOSISI (%)	NILAI (000 US \$)	KOMPOSISI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alas Kaki Olahraga (Bagian Atas Kulit)	51 771	0,50	774 785	6,02
Perhiasan selain Perak	148	0,00	652 956	5,07
Alat Perekam jenis Pita Magnetik	8 809	0,09	306 019	2,38
Alas Kaki Olahraga (Bag atas Bhn Tekstil)	29 631	0,29	287 467	2,23
Kain Tenun dari Benang Filamen Sintetik	25 974	0,25	259 516	2,02
Udang Kecil dan Udang Biasa Beku	15 232	0,15	184 124	1,43
Mantel dari Serat buatan Lain	7 763	0,08	171 667	1,33
Kain Tenun Lain Dicetak	14 281	0,14	166 617	1,29
Pesawat Penerima siaran TV berwarna	5 912	0,06	165 423	1,29
Emas dalam bentuk Gumpalan atau Batang	11	0,00	138 801	1,08
Jumlah 10 Komoditi Utama	152 532	1,55	3 107 471	24,14
Total Ekspor	10 309 066	100,00	12 870 546	100,00

Sumber : Statistik Ekspor BPS

Tabel 8.6 Nilai dan Kontribusi dari Eksportir DKI Jakarta melalui Pel Muat di DKI Jakarta Tahun 1994 (000 US \$)

S E K T O R	MELALUI PEL MUAT DKI JAKARTA	EKSPOR OLEH EKSPORTIR DKI JAKARTA	KONTRIBUSI (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. M I G A S	720 955	6 186 306	34,06
II. NON MIGAS	12 149 591	11 978 667	65,94
- HASIL PERTANIAN	384 675	498 951	2,75
- HASIL INDUSTRI	11 746 737	9 952 801	54,79
- HASIL TAMBANG DAN LAINNYA	18 179	1 526 915	8,41
T O T A L	12 870 546	18 164 973	100,00

Sumber : Statistik Ekspor BPS

Tabel 8.7 Komposisi Ekspor yang dilakukan Eksportir DKI Jakarta menurut Kelompok Barang Utama Dan Sektor, Tahun 1994

S E K T O R DAN KELOMPOK BARANG UTAMA	VOLUME (TON)	NILAI (000 US \$)	KOMPOSISI (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. M I G A S	52 465 183	6 186 306	34,06
II. NON MIGAS	27 374 405	11 978 667	65,94
- HASIL PERTANIAN	221 592	498 951	2,75
- HASIL INDUSTRI	6 075 426	9 952 801	54,79
- HASIL TAMBANG DAN LAINNYA	21 077 387	1 526 915	8,41
T O T A L	79 839 588	18 164 973	100,00

Sumber : Statistik Ekspor BPS

**Tabel 8.8 Ekspor DKI Jakarta menurut Negara Tujuan,
Tahun 1992 - 1994 (Juta US \$)**

NEGARA TUJUAN EKSPOR	1992	1993	1994
(1)	(2)	(3)	(4)
1. ASEAN	1 643,27	1 865,94	2 147,83
(Singapura)	1 300,69	1 437,18	1 667,21
2. Jepang	1 506,83	1 579,64	1 160,97
3. Asia Lainnya	1 985,80	2 173,27	2 857,88
ASIA	5 135,90	5 618,85	6 166,68
4. Amerika Serikat	2 168,06	2 529,73	2 900,60
5. Amerika Lainnya	349,37	444,47	482,60
AMERIKA	2 517,43	2 974,20	3 383,20
6. Australia dan Oceania lainnya	297,94	289,64	313,60
7. Afrika	219,26	242,63	198,04
8. M E E	1 952,00	2 204,47	2 465,51
9. Eropa Lainnya	516,37	617,73	343,52
EROPA	2 468,37	2 822,20	2 809,03
Jumlah	10 638,90	11 947,52	12 870,55

Sumber : Statistik Ekspor DKI Jakarta 1994

**Tabel 8.9 Nilai Impor DKI Jakarta menurut Negara Asal,
Tahun 1992 - 1994 (Juta US \$)**

NEGARA ASAL	1992	1993	1994
(1)	(2)	(3)	(4)
1. ASEAN	1 154,80	1 241,95	1 666,10
(Singapura)	728,73	777,11	1 064,06
2. Jepang	4 090,96	4 626,54	6 229,65
3. Asia Lainnya	2 689,82	2 937,16	3 111,12
ASIA	8 664,31	9 582,76	12 070,93
4. Amerika Serikat	1 796,25	1 598,95	1 854,72
5. Amerika Lainnya	948,87	1 041,45	1 092,76
AMERIKA	2 745,12	2 640,40	2 947,48
6. Australia dan Oceania lainnya	771,96	762,24	893,64
7. Afrika	69,40	67,57	126,02
8. M E E	2 526,49	2 890,96	3 169,23
9. Eropa Lainnya	720,21	947,50	990,92
EROPA	3 246,70	3 838,46	4 160,16
Jumlah	15 497,49	16 891,43	20 198,23

Sumber : Statistik Ekspor BPS

RINGKASAN

PENDAPATAN REGIONAL

1. Sumbangan sektor Pertanian terhadap PDRB menunjukkan penurunan 12,97 persen, disebabkan penurunan produksi beberapa jenis komoditi tanaman bahan makanan dan peternakan antara lain padi, jagung, ketela pohon dan produksi telur serta ayam.
2. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan mencapai 10,80 persen, disebabkan tingginya Nilai Tambah Bruto Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 23,42 persen, Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya 19,83 persen, Industri Barang-barang Galian bukan Logam 15,33 persen.
3. Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan; Perdagangan, Hotel & Restoran; Listrik, Gas dan Air Bersih; serta Bangunan masing-masing 11,24 persen, 7,45 persen, 7,15 persen dan 7,03 persen.
4. Ada perubahan klasifikasi sektor serta perbedaan laju pertumbuhan antar sektor, telah menyebabkan kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian DKI Jakarta mengalami sedikit pergeseran.
5. Pertumbuhan PDRB menurut penggunaan didominasi oleh Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba, kemudian diikuti Ekspor Barang & Jasa dan Konsumsi Pemerintah, masing-masing 7,83 persen, 7,07 persen dan 6,95 persen.

6. Proporsi distribusi persentase PDRB menurut penggunaan tertinggi adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto mencapai 37,91 persen, menempati urutan kedua adalah Konsumsi Rumah Tangga sebesar 33,54 persen, urutan ketiga adalah selisih nilai Ekspor dan Impor sebesar 15,86 persen, dan lainnya masing-masing kurang dari 10 persen.
7. PDRB per kapita mencapai 6 225,56 ribu rupiah, dengan persentase kenaikan 6,32 persen.

SEKTOR PERTANIAN .

1. Luas lahan pertanian setiap tahun menciut karena pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DKI Jakarta tahun 1994 sebesar 0,24 persen, paling kecil dibandingkan sektor lainnya dengan pertumbuhan - 12,97 persen.
3. Perkembangan tanaman buah-buahan naik untuk pepaya sekitar 272 persen, rambutan 50 persen, mangga 185 persen, sedangkan buah-buahan lainnya menurun.
4. Nilai produksi tanaman hias naik 7 persen. Tanaman hias yang diproduksi terdiri dari tanaman hidup dan bunga, sedangkan anggrek merupakan primadona, dengan produksi 4 147 ribu pohon dan bunga 12 114 ribu tangkai.
5. Produksi peternakan menurun 1,76 persen, sedangkan pemasukan daging tahun 1994 mencapai 11 721 ton atau terjadi peningkatan pemasukan daging 218,03 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,44 persen, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,00 persen, berarti terdapat kenaikan pendapatan per kapita yang cukup berarti. Sehingga dapat

diasumsikan pula bahwa terdapat peningkatan gizi melalui protein hewan , hal ini terlihat dari peningkatan pemasukan daging .

6. Ikan terbanyak dijual di TPI dari jenis tongkol , tengiri , selar dan kembung . Ekspor ikan terbanyak dari jenis lokal mencapai 81,6 persen . Jenis ikan yang terbanyak diekspor adalah udang mencapai 45,93 persen , tuna 34,34 persen dan lain-lain . Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama (74,31 persen) , USA 12,77 persen , Singapore 6,32 persen .

SEKTOR INDUSTRI .

1. Nilai tambah Industri Besar/Sedang mencapai 10 080 milyar rupiah , dengan kontribusi utamanya dari sub sektor industri barang-barang dari logam mencapai 41,30 persen; Industri tekstil , pakaian jadi dan kulit 25,39 persen ; Industri kimia dan barang-barang dari kimia 12,40 persen .
2. Industri barang-barang dari logam merupakan primadona Sektor Industri dengan output sebesar 8 962 472,4 juta rupiah (37,75 persen) , Input 4 010 481,0 juta rupiah (35,13 persen) dan nilai tambah 4 162 890,4 juta rupiah (41,30 persen)
3. Merupakan primadona sub sektor industri lainnya adalah sub sektor industri tekstil,pakaian jadi dan kulit , diikuti oleh sub sektor kimia dan barang-barang dari kimia , kemudian sub sektor industri Makanan , minuman dan tembakau.

4. Dalam skala industri kecil dan rumah tangga , maka sub sektor industri tekstil, pakaian jadi & kulit juga merupakan primadona dengan output 271 464,37 juta rupiah (62,41 persen) , input 166 966,88 juta rupiah (63,02 persen) dan nilai tambah 104 497,49 (61,46 persen).
5. Industri Besar/Sedang dengan jumlah perusahaan 2 284 perusahaan mampu menyerap sekitar 23 741 ribu tenaga kerja, sedangkan industri kecil/rumah tangga dengan 6 448 perusahaan menyerap sekitar 54 ribu tenaga kerja .

SEKTOR LISTRIK , GAS DAN AIR BERSIH.

Produksi dan Penggunaan Listrik, Gas dan Air Bersih selama kurun waktu tahun 1990 hingga 1994 sebagai berikut :

1. Produksi listrik meningkat dari 9 405 509 ribu KWH menjadi 13 570 102 ribu KWH , atau terjadi peningkatan produksi rata-rata 11,07 persen per tahun .
2. Banyaknya listrik terjual juga meningkat dari 7 700 739 ribu KWH menjadi 11 907 042 ribu KWH , jadi terjadi peningkatan rata-rata 13,66 persen per tahun .
3. Peningkatan produksi listrik lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan banyaknya listrik yang terjual . Selain itu terdapat penyusutan dan cadangan listrik tahun 1994 sebesar 12,26 persen .
4. Peningkatan produksi Gas Kota rata-rata 42,23 persen per tahun, sedangkan peningkatan penjualan 45,32 per per tahun .

5. Produksi PAM meningkat rata-rata 7,90 persen per tahun, dan produksi pada tahun 1994 mencapai 344 230 ribu M3, sedangkan yang terjual 167 612 M3. Penyusutan dan cadangan air mencapai 52,78 persen.
6. Produksi air Sumur Dalam meningkat dari 28 460 ribu M3 menjadi 35 471 ribu M3, terjadi kenaikan produksi rata-rata 6,16 persen per tahun.
7. Perkembangan produksi air bersih rata-rata 7,73 persen per tahun, sedangkan yang terjual 8,48 persen.
8. Persentase peningkatan kebutuhan Listrik, Gas Kota dan Air Bersih setiap tahun lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan produksi, namun demikian jumlah produksi masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penjualan atau kebutuhan akan Listrik, Gas, dan Air Bersih.
9. Selain itu dapat diinformasikan pula bahwa produksi dan penggunaan Gas Kota meningkat cukup tajam dengan rata-rata lebih dari 40 persen per tahun.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI .

1. Volume ekspor DKI Jakarta utamanya dari Migas, mencapai 6 351,9 ribu ton (61,61 persen), ekspor non Migas 3 957,2 ribu ton (38,39 persen).
2. Ekspor hasil industri mendominasi ekspor DKI Jakarta dengan volume 3 697,05 ribu ton (93,43 persen) dengan nilai 11 11 746,74 juta US \$ (96,68 persen).
3. Kontribusi volume ekspor barang-barang industri mencapai 93,43 persen terhadap ekspor non Migas atau kontribusinya 35,86 persen terhadap ekspor DKI Jakarta termasuk Migas.

4. Kontribusi nilai ekspor barang-barang industri mencapai 96,68 persen terhadap nilai ekspor tanpa Migas, atau bila tanpa Migas mencapai 91,27 persen terhadap total ekspor DKI Jakarta .
5. Ekspor ke Negara Asean terutama ke Singapura dan Jepang masing-masing 1 667,21 juta US \$ (12,95 persen) dan 1 160,97 juta US \$ (9,02 persen). Negara tujuan ekspor lainnya ke Amerika Serikat mencapai 2 900,60 juta US \$ (22,54 persen) , dan ke negara MEE sebesar 2 465,51 juta US \$ atau (19,16 persen).
Dibandingkan tahun 1993 maka ekspor ke Jepang mengalami penurunan 26,50 persen sesudah terjadi kenaikan 4,83 persen pada tahun 1993. Ekspor ke MEE meningkat sejak tahun 1992 , dengan peningkatan rata-rata 13,15 persen per tahun .
6. Pertumbuhan nilai ekspor DKI Jakarta sejak tahun 1989 hingga 1994 rata-rata 35,78 persen per tahun . Bila dibandingkan dengan angka Nasional dengan rata-rata 16,15 persen per tahun, maka pertumbuhan nilai ekspor DKI Jakarta lebih tinggi.
7. Peranan nilai ekspor DKI Jakarta terhadap Nasional sejak tahun 1989 hingga 1994 meningkat dari 20,82 persen menjadi 32,13 persen, atau rata-rata 28,47 persen per tahun.
Volume ekspor sejak tahun 1989 hingga 1994 menunjukkan penurunan rata-rata 10,45 persen per tahun.

8. Kontribusi nilai ekspor hasil industri sebesar 11 746,74 juta US \$ mendominasi ekspor dengan persentase 96,68 persen terhadap ekspor tanpa Migas, sedangkan terhadap ekspor total sebesar 91,27 persen.

Volume ekspor hasil industri sebesar 6 075,43 ribu ton mencapai 93,43 persen terhadap ekspor tanpa Migas, sedangkan terhadap ekspor total 35,86 persen.

<https://jakarta.bps.go.id>

<https://jakarta.bps.go.id>

BPS

KANTOR STATISTIK PROPINSI DKI JAKARTA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9

Telp. 3840084 JAKARTA